

Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA



KOMPARASI EKSTISTENSI
DAN APLIKASI

SYARI'AT ISLAM

ZAMAN PERJUANGAN

GAM DENGAN
GERAKAN
DI/TII

DI ACEH



DINAS SYARIAT ISLAM
ACEH



Hasanuddin Yusuf Adan

**KOMPARASI
EKSISTENSI DAN APLIKASI
SYARI'AT ISLAM**

**ZAMAN PERJUANGAN GAM
DENGAN GERAKAN DI/TII DI ACEH**

**Dinas Syariat Islam Aceh
2022**

KOMPARASI EKSISTENSI DAN APLIKASI SYARI'AT ISLAM ZAMAN PERJUANGAN GAM DENGAN GERAKAN DI/TII DI ACEH

Penulis:

Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA

Editor:

Muhammad Maulana

Tata Letak Isi:

Abdul Muid, SE

Desain Cover:

Syah Redha

ISBN: 978-602-5895-19-7

Diterbitkan oleh:

Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh

Jln T. Nyak Arief No.221, Jeulingke. Banda Aceh

Email : dsi@acehprov.go.id

Telp : (0651) 7551313

Fax : (0651) 7551312, (0651) 7551314

Copyright ©, November 2022

Ukuran: 14,5 x 21 cm; Halaman: xiv + 124

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari pihak penerbit.



PENGENALAN

Aceh mengalami dua kali pemberontakan terhadap Republik Indonesia (RI) dalam konteks upaya mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang diprakarsai oleh gerakan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) tahun 1953-1962 dan upaya pemisahan diri dari RI yang dimotori oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 1976-2005. Keduanya berencana untuk menjalankan syari'at Islam di bumi Aceh baik masa perjuangan maupun ketika Aceh merdeka nantinya. Ada persoalan yang perlu diketahui dalam dua masa tersebut adalah; Apakah perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bertujuan untuk menegakkan syari'at Islam dalam wilayah Aceh ketika merdeka dari Indonesia atau semata-mata untuk menegakkan negara Aceh dengan sistem nasionalisme ke-Aceh-an? Dan di mana letak hakikat perbedaan antara perjuangan GAM dengan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) terkait dengan isu implementasi syari'at Islam di Aceh? Untuk mengetahui dua persoalan tersebut penulis menggunakan metode

penelitian kualitatif dalam merampungkan penulisan ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DI/TII murni berjuang untuk mendirikan Negara Islam Indonesia yang Aceh sendiri berada di dalamnya dengan upaya menjalankan syari'at Islam kaffah di dalam negara tersebut khususnya di Aceh. Sementara perjuangan GAM pada awalnya mengedepankan Islam dan syari'at Islam karena para pejuang periode awal terdiri dari mantan-mantan pejuang DI/TII. Namun di periode akhir perjuangan sudah menggunakan strategi amfibi dengan cara mengedepankan Islam dan syari'at Islam bagi keperluan internal di dalam wilayah Aceh, dan menghembuskan angin nasionalisme ke-Aceh-an untuk konsumsi eksternal di peringkat internasional. Strategi ini digunakan untuk memudahkan perolehan bantuan antarabangsa dalam perjuangan pemisahan diri Aceh dari Indonesia. Walaubagaimanapu, sampai berakhirnya perjuangan GAM dan berdamai dengan Indonesia 15 Agustus 2005 tidak satupun target dari strategi yang dipasang dapat dicapai. Semestinya bagi perjuangan Islam oleh muslim bantuan sepenuhnya yang diharapkan adalah dari Allah SWT bukan dari dunia internasional, dalam hal ini sikap DI/TII jauh lebih Islami ketimbang strategi GAM yang bersifat amfibi.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, dengan izin Allah yang Maha Kuasa, Maha ‘Alim lagi Maha Bijaksana, penulisan ini selesai dikerjakan dengan maksimal. Shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW., berkat perjuangan panjang yang mematikan dari beliau sehingga ilmu pengetahuan sampai ketangan kita hari ini. Pengetahuan itu akan mengalir seperti air mencari dataran rendah di bumi Allah ini, demikian juga proses belajar mengajar senantiasa berlangsung secara alami dari generasi tua kepada generasi muda, ia terus berlanjut dari generasi muda ke generasi muda berikutnya sehingga dunia ini berakhir.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi khazanah baru untuk generasi berikut yang tidak hidup pada zaman kejadian yang kami tuliskan di sini. Semoga generasi berikut

dapat menjadikannya sebagai cermin tempat mengaca diri sehingga tidak tersungkur dalam lobang yang sama akibat perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang sama pula. Cermin itu penting bagi kehidupan sesuatu generasi sebagai tempat berkaca diri agar diri dapat berpenampilan cantik, indah, dan *handsome* dipandang mata.

Penulisan yang bertajuk; Komparasi eksistensi dan aplikasi syari'at Islam zaman perjuangan GAM dengan gerakan DI/TII di Aceh berupaya menghadirkan data orisinil seadanya sehingga jauh dari unsur-unsur diskriminatif, eksploitatif, dan antisipatif terhadap salah satu komponen komunitas yang menjadi sasaran penelitian ini. Semoga saja hasil yang kita peroleh betul-betul berada pada posisi objektif, logis dan konstruktif. Kepada pihak-pihak yang merasa terdiskriminasi dengan hasil penelitian ini anggap saja ini merupakan salah satu ajang *social control* untuk *improvement* kualitas hidup masa depan. Insy Allah.

Kepada semua pihak yang terlibat ikut mensukseskan penelitian dan penulisan buku ini baik langsung atau tidak langsung kami mengaturkan banyak terimakasih semoga jasa baiknya menjadi *amalan shaliha* di hadapan Allah SWT.

Banda Aceh, 15 Mei 2022,



Hasanuddin Yusuf Adan.



KATA PENGANTAR KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

Puji Syukur penerapan Syariat Islam di Aceh telah melewati lorong sejarah yang panjang dan berliku. Sejarah mencatat sejak Islam pertama kali masuk ke Aceh dan menjadi anutan masyarakat hingga berdirinya beberapa kerajaan Islam telah menyemai keinginan untuk menjadikan Islam sebagai way of life. Dengan semangat pada nilai-nilai keislaman ini Aceh dikenal sebagai wilayah teritorial yang religius ditopang oleh pengembangan keilmuan Islam yang termasyhur di tanah rencong ini muncul ulama-ulama besar yang turut mewarnai perkembangan Islam bukan hanya pada level Nusantara tetapi sampai pada Asia Tenggara.

Dengan bekal kebesaran sejarah, keulamaan clan keinginan mayoritas masyarakat Aceh, selang tiga tahun setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pada 17 Juni 1948 Tgk. M. Daud Beureueh dengan serius meminta untuk memberlakukan SI kepada Presiden Soekarno ketika datang ke Aceh, tetapi permintaan ini tidak dikabulkan. Beliau kemudian melakukan perlawanan dengan mendirikan DI/TII. Pemberontakan ini dapat dimaknai sebagai ukuran betapa besar keinginan masyarakat Aceh terhadap penerapan Syariat Islam di tanah rencong ini.

Secara sosiologis penerapan syariat Islam di Aceh didukung oleh sistem sosial dan budaya masyarakat yang kental dengan nilai-nilai yang keislaman. Hal ini dapat diamati dari struktur pemerintahan paling bawah yang dikenal dengan istilah gampong (desa), dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut keuchik, ia mengurus masalah administrasi dan pemerintahan, sedangkan yang mengurus masalah agama adalah teungku imuem. Struktur ini teraplikasi sama sampai pada level paling atas, yaitu negara (kerajaan), ada sultan dan qadhi malikul adil (ulama). Sehingga dalam pepatah Aceh disebut Adat bak po tuemeureuhom hukom bak syiah kuala. “(adat berasal dari pemerintah, dan hukum berasal dari ulama). Sehingga Syariat Islam dapat dikatakan menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law).

Semua keinginan luhur ini akhirnya mendapatkan legalitas yuridis melalui UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa

Aceh dan UU No. 18 Tahun 2001 Syariat Islam di Aceh secara kafah. Sejalan dengan itu maka pada tanggal 1 Muharram 1423 Hijriah bertepatan dengan 15 Maret 2002 secara resmi syariat Islam dideklarasikan pada masa Gubernur Abdullah Puteh. Selanjutnya kedua UU tersebut diperkuat oleh UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Dinas syariat Islam Aceh menyambut baik kehadiran buku ini, sebagai salah satu upaya sosialisasi memperkenalkan pemahaman bagaimana sejarah pelaksanaan syariat islam di Aceh dalam upaya membentengi diri dari pengaruh ajaran yang tidak sesuai dengan aqidah Islam. Di samping itu buku ini dapat menjadi inspirasi sekaligus memberikan informasi tentang perjuangan penegakan Syariat Islam baik dimasa GAM maupun DI/TII.

Akhirnya Dinas Syariat Islam Aceh mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberi perhatian menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tertulis. Penyebaran ide dan gagasan melalui karya tulis adalah bentuk partisipasi dan kepedulian terhadap upaya mengenalkan aliran-aliran kepercayaan yang pernah ada dan berkembang dalam sejarah Islam.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah sumber kepustakaan sekaligus mampu meminimalisir pengaruh ajaran-ajaran yang sedang berkembang di Provinsi Aceh, khususnya bagi para pelajar yang sedang menempuh Pendidikan di sekolah-sekolah yang materi

pelajaran di bidang aqidah sangat terbatas.

Semoga buku ini dapat bermamfaat dan menjadi amal shaleh bagi penulis dan pembacanya. Amin.

WaAllahuA lam bi al-Shawab

Banda Aceh, November 2022
Kepada Dinas Syariat Islam Aceh

Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M. Hum



DAFTAR ISI

Pengenalan ~ iii

Kata Pengantar ~ v

Kata Pengantar Kepala Dinas Syariat Islam Aceh ~ vii

Daftar Isi ~ xi

Bab Satu: Pendahuluan ~ 1

Bab Dua: Studi Kepustakaan Dan Kerangka Teori ~ 11

Bab Tiga: Metode Penelitian ~ 17

Bab Empat: Perjuangan Di/Tii Dan Gam Dalam Lintasan Sejarah ~ 23

A. Latar Belakang Munculnya Pemberontakan DI/TII ~ 23

1. Ingkar janji presiden Soekarno terhadap Aceh ~ 43

2. Diskriminasi dan hadu domba RI terhadap Aceh ~ 48
3. Tidak menghargai jasa pertahanan Aceh terhadap kemerdekaan RI ~ 61
4. Tidak mengizinkan Aceh berlaku syari'ah ~ 64
5. Mempermainkan Pancasila sebagai alat menolak Islam jadi dasar negara ~ 65

B. Latar Belakang Munculnya Pemberontakan GAM ~ 67

1. Tidak Adilnya Indonesia terhadap Aceh ~ 70
2. Rekrutmen Sumber Daya Alam (SDA) Aceh untuk kepentingan RI ~ 73
3. Tidak menghargai Aceh sebagai pendiri dan penyelamat RI ~ 73
4. Tidak mengizinkan berlakunya syari'at Islam terhadap Aceh ~75
5. Menyambung perjuangan yang putus dari Tgk. Chik Di Tiro ke Tengku Hasan Tiro ~ 76
6. Mengklarifikasi sejarah perjuangan endatu dari perlawanan terhadap Belanda ke perlawanan terhadap Indonesia ~ 77

Bab Lima: Persamaan Dan Perbedaan Perjuangan DI/TII Dengan GAM ~ 79

A. Perjuangan DI/TII yang berbasis syari'ah dari awal sampai akhir ~ 79

1. Perjuangan sebagai jihad fi sabilillah ~ 79
2. Berjuang melawan kedhaliman ~ 80
3. Ingin mewujudkan Aceh sebagai bahagian dari DI/TII ~ 82
4. Ingin menjalankan syari'at Islam kaffah dalam

negara Aceh ~ 82

B. Perjuangan GAM yang berbasis ke-Aceh-an ~ 83

1. Perjuangan untuk mengembalikan marwah Aceh ~ 83
2. Perjuangan untuk menguasai hasil alam Aceh ~ 85
3. Perjuangan untuk menyejahterakan bangsa Aceh ~ 85
4. Perjuangan untuk memerdekakan Aceh ~ 86

C. Sinkronisasi perjuangan antara Islam, DI/TII, dan GAM ~ 87

1. Konsep Ideologi perjuangan ~ 87
2. Konsep negara ~ 89
3. Bentuk negara ~ 90
4. Sistem pemerintahan ~ 93

D. Paradoksi perjuangan antara konsep Islam, DI/TII, dan GAM ~ 98

1. Tujuan perjuangan ~ 98
2. Dasar perjuangan ~ 102
3. Cara berjuang ~ 103
4. Para pejuang ~ 106

E. Eksistensi syari'at islam dalam perjuangan DI/TII dan GAM ~ 108

Bab Enam: Penutup ~ 113

Daftar Pustaka ~ 115

Biodata Penulis ~ 119



BAB SATU PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Pertarungan Aceh dengan Republik Indonesia (RI) dalam dua masa (Darul Islam/Tentera Islam Indonesia/DI/TII dan Gerakan Aceh Merdeka/GAM) kini menjadi nilai sejarah yang amat berharga bagi bangsa ini. Harga **pertama** adalah kedua pertarungan tersebut tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, harga **kedua** adalah sama-sama kembali berbakti untuk negara RI, dan harga **ketiga** adalah ada sisi beda antara perjuangan DI/TII dengan GAM yang sangat prinsipil yakni hakikat perjuangan antara nasionalisme Islam dengan nasionalisme kebangsaan.

Padra, demikian istilah bahasa Aceh terhadap sebuah pertandingan dan perlawanan yang tidak ada

pihak yang kalah dan tidak ada pihak yang menang. Istilah dalam bahasa Indonesianya adalah “seri”. *padra* dan seri sama-sama mengandung makna berimbang dalam sesuatu perlawanan dan pertandingan yang berakhir *draw* dalam bahasa Inggris. Dua kali perlawanan Aceh terhadap RI baik DI/TII maupun GAM, keduanya tidak mengalami kekalahan sebagaimana perlawanan-perlawanan yang terjadi di wilayah lain di Indonesia yang selalu pihak para pemberontak yang memperoleh kekalahan. Ini merupakan rahmat Allah SWT kepada para pejuang Aceh sehingga mereka tidak kehilangan muka dengan pihak RI, karena itu muslim Aceh harus bersyukur dan bertaqwa kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang diberikanNya.

Uniknya lagi kedua pergerakan Aceh tersebut setelah terjadi perdamaian dengan RI sama-sama berbakti kembali dengan cara yang selaras dengan konstitusi terhadap Indonesia. Para pejuang Aceh dari dua pergerakan tersebut tidak lagi menaruh dendam setelah berdamai dengan pihak RI. Hal inipun jarang-jarang terjadi di belahan dunia ini, di beberapa negara yang pernah terjadi pemberontakan ketika terjadi perdamaian pihak pemberontak tetap saja mengangkat senjata melawan rezim berkuasa seperti yang pernah terjadi di Filipina dalam kasus Hasyim Slamet, di Srilanka dalam kasus Tamil Nado, dan sebagainya.

Khusus untuk dua kali perlawanan Aceh terhadap RI antara GAM dengan DI/TII terdapat keunikan tersendiri masing-masingnya. DI/TII berjuang lebih kurang Sembilan setengah tahun berhasil mengangkat harga diri bangsa Aceh dari keterpurukan ciptaan RI sehingga Aceh diberikan gelar Daerah Istimewa. Sementara hasil perjuangan GAM

memperoleh hak istimewa sekaligus otonomi khusus yang tidak diperoleh wilayah manapun di Indonesia hari ini. Yogyakarta memiliki keistimewaan berkenaan dengan kerajaan yang memelihara kesultanan tetapi tidak memiliki otonomi khusus seperti Aceh. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Papua hanya memiliki kekhususan tanpa keistimewaan. Jadi kelebihan Aceh pasca dua kali pemberontakan betul-betul luar biasa dan tidak dimiliki wilayah lain di Indonesia, yaitu memiliki keistimewaan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999 dan otonomi khusus dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 yang populer dengan UUPA.

Kesemua itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para ilmuwan untuk mengkaji dan menganalisa satu persatu dalam ranah ilmu pengetahuan sosial yang bakal menjadi pengalaman paling berharga bagi kehidupan anak cucu bangsa di masa mendatang. Bagi para praktisi politik dua pertarungan tersebut dapat pula dijadikan langkah awal untuk penyatuan strategi lanjutan untuk membuat perjuangan berikutnya memperoleh kemenangan dan tidak berhasil seimbang sebagaimana yang terjadi pada dua pertarungan tersebut yang sudah banyak menelan korban.

Ada sejumlah argument-argumen penting dipilihnya masalah dalam penelitian ini yang sangat mustahak dikemukakan di sini adalah: Perlawanan Aceh terhadap RI tidak terjadi di propinsi lain selama Indonesia wujud dalam peta dunia. Aceh sudah dua kali mengangkat senjata melawan RI pada saat RI sedang berada pada kondisi kuat dan mendapatkan perhatian kuasa besar dunia, hal

semacam ini belum terjadi di wilayah lain seluruh Indonesia. Perlawanan GAM terhadap RI umpamanya terjadi pada masa Orde Baru yang tidak seorangpun berani melawan kepemimpinan Soeharto, tetapi Aceh berani melawannya karena faktor ketidakadilan dan tidak menghargai Aceh sebagai pendiri RI.

Satu keanehan dalam kancah peperangan terjadi untuk Aceh adalah perlawanan yang tidak pernah kalah dan tidak pula menang seperti dalam kasus DI/TII dan GAM. Kedua kasus tersebut para pemimpin gerakan Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh dan Tengku Hasan di Tiro keduanya selamat dan dapat hidup bersama masyarakat pasca selesainya perang, hal ini tidak terjadi di Jawa Barat yang pemimpinnya Karto Suwiryo meninggal dieksekusi rezim Soekarno, di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan yang Kahar Muzakkar dan Ibnu Hajar juga meninggal dalam pergolakan, tetapi di Aceh beda kejadiannya.

Selesai bertarung, baik pemimpin perjuangan maupun para pejuang yang melawan RI di Aceh dapat hidup damai kembali seperti sediakala. Tidak ada hal-hal yang membahayakan salah satu pihak yang bertikai setelah terjadinya perdamaian, situasi semacam ini menjadi sesuatu yang unik, luarbiasa dan juga jarang-jarang terjadi di tempat lain, baik di Indonesia maupun di dunia. Tetapi tidaklah perlu konflik itu harus terulang lagi karena kerugian kedua belah pihak yang bertikai tidak pernah sebanding dengan hasil yang dicapai dalam perjuangan tersebut.

Bagi wilayah Aceh walaupun korban yang berjatuhan sangat amat banyak sehingga sulit untuk dihitung dan tak

terhitung harganya, namun setelah pertarungan berlalu perhatian RI terhadap Aceh malah semakin meningkat. Dan ini sudah menjadi langgam perilaku RI terhadap Aceh, kalau Aceh ingin sesuatu dari pemerintah RI maka Aceh harus berontak dahulu baru keinginan itu dasahuti oleh RI. Pengalaman semacam ini terjadi dalam dua perlawanan besar Aceh terhadap RI yaitu perjuangan GAM dan DI/TII. Setelah perjuangan tersebutlah Aceh mendapatkan Daerah Istimewa (walaupun sebatas nama saja dan tidak pernah diberikan undang-undang pelaksanaannya) pasca damai RI dengan DI/TII. Demikian juga selesai konflik GAM dengan RI Aceh mendapatkan Undang-undang RI No. 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dalam bidang agama, adat istiadat, pendidikan dan bidang peran ulama dalam pemerintahan Aceh, serta Undang-undang RI No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sering disebut dengan UUPA sebagai bukti kekhususa Aceh.

Aceh mendapat keistimewaan dalam tiga bidang pasca perang DI/TII yaitu istimewa dalam bidang agama, bidang adat istiadat, dan bidang pendidikan. Sedangkan pasca perang GAM dengan RI Aceh mendapatkan empat keistimewaan, yakni; istimewa dalam bidang agama, bidang adat istiadat, bidang pendidikan, dan bidang peran ulama dalam pemerintah Aceh. Prihal semacam ini juga menjadi sesuatu yang lebih bagi Aceh karena tidak semua propinsi di Indonesia mendapatkan keistimewaan seperti Aceh. Kata kuncinya memang semua itu harus diperoleh melalui jalur perang menyerang RI, tidak berani melakukan itu maka jangan mimpi dapat istimewa dari RI.

Ada kesan perbedaan tujuan perjuangan yang sangat

mencolok antara dua perlawanan Aceh terhadap RI yaitu antara GAM dengan DI/TII. GAM cenderung berjuang pada hujung perjuangannya semata-mata ingin mebebaskan Aceh dari RI, tidak ada target lebih dari itu, makanya ketika perang sedang berkecamuk RI menawarkan syari'at Islam untuk Aceh, para pejuang GAM tetap saja tidak mau menerimanya karena target perjuangan mereka bukan itu melainkan ingin memisahkan Aceh dari RI. Beda halnya dengan perjuangan DI/TII yang dari awalnya sudah pasang niat berjihad untuk menegakkan negara Islam dengan memberlakukan syari'at Islam penuh di bumi Aceh manakala ia merdeka dari Indonesia nantinya.

Terdapat dua keanehan dalam dua peristiwa ini adalah; ketika DI/TII bergolak meminta syari'at Islam untuk Aceh, RI tidak pernah memberinya. Sementara ketika GAM tidak meminta syari'at Islam malah ketika itu RI memberlakukan syari'at Islam untuk Aceh sampai sekarang ini. Dalam kasus ini nampak ketidak ikhlisan RI terhadap Aceh dan sangat nampak sifat munafiknya yang mempermainkan syari'ah untuk kepentingan politik yang tiada ujung.

Ada isu-isu yang muncul dalam dua pergerakan Aceh terhadap RI itu seperti pernyataan sejumlah petinggi TNI yang mengeluarkan statemen: GAM akan kita habisi sampai ke akar-akarnya sehingga mereka harus bertekuk lutut kepada kita.¹ Ternyata pernyataan tersebut tidak mampu diwujudkan dalam kenyataannya sehingga terkesan mereka besar sekali gertak sambalnya. Ketika terjadi perdamaian antara GAM dengan RI juga banyak isu yang muncul di Jakarta seperti penolakan berdamai

1 <http://arsip.gatra.com/artikel.php?id=28474>

antara GAM yang dianggap separatis dengan RI sebagai sebuah negara seperti yang dilakukan Anggota Komisi I DPR Pusat Permadi, SH tahun 2005.² Macam-macam prediksi yang muncul dari petinggi negara RI di ibukota Jakarta untuk menyatakan tidak setuju berunding dengan separatis. Namun apa yang menjadi kenyataan hari ini sama sekali tidak seperti yang mereka ramalkan dahulu.

Dalam kalangan GAM sendiri juga muncul isu-isu menarik seperti; kalau GAM menang dan Aceh merdeka dari RI maka rakyat Aceh tidak perlu kerja karena semuanya digaji oleh negara. Sesuatu yang sulit diwujudkan dalam kenyataan apabila perjuangannya berhasil dan wilayah yang diperjuangkan merdeka. Ada banyak issue lain lagi baik yang rasioanl maupun yang irrasional muncul pada masa itu.

Perjuanga DI/TII yang telah gagal mewujudkan negara Islam di Indonesia telah banyak disalah manfa'atkan oleh sejumlah orang, seperti ucapan orang: DI/TII telah gagal mewujudkan negara Islam maka sekarang kita tidak perlu mengangkat isu negara Islam lagi karena kita tidak mampu menegakkannya. Kesenjangan pemikiran semacam itu sangat rancu dimiliki oleh para sarjana Islam yang mengikuti perintah agama khususnya dalam bingkai syari'ah sehingga dapat secara langsung atau tidak langsung memojok perjuangan Rasulullah SAW yang justeru Berjaya raya mewujudkan negara Islam di bumi yang dipijak oleh kaum kafir yaitu Madinah. Kalau beliau bisa berhasil kenapa kita tidak, kuncinya ada pada sistem

2 Merdeka, Rabu, 8 Juni 2005. Lihat juga situsnya; <https://www.merdeka.com/politik/dpr-menolak-pemerintah-melakukan-perundingan-dengan-gam-rycmmiu.html>

perjuangan yang mesti selaras dengan sistem perjuangan Rasulullah SAW.

Penulisan ini perlu diwujudkan mengingat belum semua orang dapat membedakan arah dan strategi perjuangan antara GAM dengan DI/TII. Padahal ketika kita telusuri secara mendalam di sana terdapat perbedaan besar dalam penetapan tujuan perjuangan, yakni antara perjuangan nasionalisme dengan perjuangan Islamisme atau perjuangan nasionalisme ke-Aceh-an dengan nasionalisme ke-Islam-an. DI/TII berjuang untuk tegaknya syari'at Islam di Aceh dalam negara Islam Aceh dan Negara Islam Indonesia, sementara tujuan GAM berjuang hanya untuk memisahkan Aceh dari RI dengan cara refolusi tanpa dikaitkan dengan implementasi syari'ah di sana.

Oleh karenanya terasa amat perlu diadakan penelitian ini mengingat belum ada pihak lain yang meneliti apa yang sedang penulis lakukan hari ini. Penelitian ini mengarah kepada kajian perlawanan GAM dan DI/TII terhadap RI dengan stressing poinnya kepada tujuan perjuangan yang berbeda antara keduanya, yakni antara kepentingan nasionalisme kebangsaan dengan nasionalisme Islam. Ini merupakan perbedaan telak yang sangat menarik dan penting diteliti untuk memberikan kejelasan kepada anak bangsa yang hidup pada masanya masing-masing.

RUMUSAN MASALAH

Untuk mengarahkan penelitian ini kepada titik tujuan yang akan dituju perlu diberikan rumusan masalah yang konkrit sehingga memudahkan dalam pengumpulan data dan penyempurnaan laporan di akhir penelitian, untuk keperluan tersebut maka kami turunkan dua rumusan

masalah yang sangat urgen dan signifikan, yaitu:

1. Apakah perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bertujuan untuk menegakkan syari'at Islam dalam wilayah Aceh atau untuk menegakkan negara Aceh dengan sistem nasionalisme ke-Aceh-an?
2. Di mana letak hakikat perbedaan antara perjuangan GAM dengan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) terkait dengan isu implementasi syari'at Islam di Aceh?

TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Untuk menjawab dua rumusan masalah di atas perlu kami berikan jawaban terhadap rumusan masalah tersebut sebagai suatu koneksitas dari pada prinsip sesuatu penelitian ilmiah, adapun tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui tujuan perjuangan GAM memisahkan diri dari Republik Indonesia (RI), apakah untuk menjadikan Aceh sebuah negara Islam dengan syari'at Islam berlaku penuh di dalamnya, atau hanya ingin mendirikan negara Aceh dengan sistem nasionalisme ke-Aceh-an.
2. Untuk mengetahui di mana letak perbedaan antara perjuangan GAM dengan DI/TII dalam menegakkan negara Aceh terkait dengan isu implementasi syari'at Islam di Aceh.

Penelitian ini sangat perlu dan penting dilakukan untuk mencari tau hakikat perjuangan dua gerakan perlawanan Aceh terhadap RI, yaitu gerakan DI/TII dan GAM. Mengingat terdapat sejumlah perbedaan tujuan

perlawanan antara DI/TII dengan GAM terhadap RI yang belum banyak diketahui orang, maka penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan. Apalagi sejauh ini belum banyak dilakukan kajian khusus berkenaan dengan hakikat tujuan perlawanan antara DI/TII dengan GAM seperti yang kami lakukan ini.

Kajian ini juga sangat penting dilakukan untuk mengingatkan kembali betapa jeranya kehidupan masyarakat dalam suasana konflik yang hampir setiap hari ada orang yang meninggal sehingga nyawa seperti tidak berharga lagi pada waktu itu, baik pada masa DI/TII maupun pada masa GAM. Dengan demikian anak bangsa ini akan lebih berhati-hati dalam menggerakkan massa untuk melawan pemerintah RI pada masa-masa yang akan datang, sehingga anak bangsa ini memiliki lebih banyak masa dan peluang untuk membenah diri baik mencari ilmu pengetahuan, mencari rizki lewat berbagai jalur seperti perniagaan, kontraktor, jasa angkutan, jasa professional dan sebagainya.

Selebihnya kajian ini sangat penting dilakukan untuk mempererat kembali tali silaturahmi antara sesama muslim di negara RI yang didominasi ummat Islam. Dua kali perlawanan Aceh terhadap RI (DI/TII dan GAM) membuat hubungan silaturahmi antara masyarakat Aceh dengan masyarakat RI sangat renggang dan bahkan cenderung menjadi putus. Padahal kedua komunitas tersebut adalah muslim yang dalam Islam diwajibkan bersaudara dan harus saling bantu membantu.



BAB DUA STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORI

Studi kepustakaan perlu dilakukan dalam sesuatu penelitian ilmiah selain untuk menghindari terjadinya plagiasi atau copy-paste, ia juga sangat mustahak dilakukan untuk memudahkan peneliti memperoleh data dari berbagai sumber dan berbagai bentuk, baik dalam bentuk buku atau dokumen lainnya. Selain itu ia dapat mengarahkan peneliti untuk mencari data berdasarkan hasil studi perpustakaan yang dilakukannya. Biasanya untuk penelitian lapangan studi kepustakaan sangat membantu peneliti untuk memudahkan memperoleh data.

Selain itu ia dapat berfungsi juga untuk mengkondisikan bahwa hasil sesuatu penelitian ilmiah

yang memakai studi kepustakaan menjadi lebih akurat dan jauh dari nilai-nilai plagiasi. Dengan studi perpustakaan seorang peneliti telah dibatasi upaya-upaya plagiasi dan copy-paste. Untuk keperluan itu pula seorang peneliti perlu mengikat diri dengan ketentuan yang ada sehingga hasil penelitian nantinya akan berkualitas tinggi dan bermutu tinggi sehingga layak memperoleh apresiasi dari mana saja.

Untuk lebih konkrit wujud studi kepustakaan dalam penelitian ini, kami berusaha untuk memperoleh sejumlah buku dan karya ilmiah lainnya berupa manuskrip, thesis, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu sebagai batasan penelitian dan juga sebagai antisipasi bagi plagiasi. Di antara buku-buku dan bahan lainnya yang selaras dengan penelitian ini adalah: Andrew R. Kahin (1990), *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Jakarta: Grafiti, James T. Siegel (1969), *The Rope of God*, California: University of California Press,. Anthony Reid (1979), *The Blood Of The People*, Kuala Lumpur: Oxford University Press. Alfian (1990), "The Ulama in Acehnese Society", Ahmad Ibrahim at al, *Reading on Islam in Southeast Asia*.

Selain itu ada tulisan S.S. Djuangga Batubara (1987) *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh Mujahid Teragung di Nusantara*, Medan: GPPRIFSM. Tulisan ini menggambarkan bagaimana para mujahidin DI/TII demikian gigih dan yakin berjuang untuk mewujudkan Islam dan negara sehingga tidak mengenal lelah. Penulis juga menerangkan betapa sesungguhnya para mujahidin berperang karena kecewa tertipu oleh presiden pertama Soekarno, perekrutan hasil alam Aceh untuk kepentingan Jakarta, dan persoalan

antara syari'at Islam untuk Aceh serta nasionalisme untuk Indonesia.

Ada pula buku yang ditulis oleh Nazaruddin Syamsuddin (1990), *Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta: Grafiti. Buku ini menggambarkan keseriusan para pejuang DI/TII karena landasan Islam dan ingin mewujudkan negara Islam Indonesia termasuk Aceh di dalamnya. Penulis buku ini juga banyak mengupas diskriminasi RI terhadap Aceh yang di luar kewajaran dan kemanusiaan, pasalnya Aceh sengaja dianak tirikan dalam peluang kenikmatan tetapi sebaliknya Aceh dijadikan pemenang ketika berhadapan dengan penjajah Belanda.

Ada buku yang ditulis Hasan Saleh dengan judul *Mengapa Aceh Bergolak*, yang diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Utama Grafiti. Buku ini membahas tentang penyebab munculnya DI/TII di Aceh yang pada dasarnya seperti dikondisikan oleh pemerintah RI di Jakarta sehingga membuat para ulama dan pemimpin Aceh berkesimpulan dari pada didahului lebih baik mendahului, artinya daripada ditangkap oleh pemerintah RI lebih baik berontak melawan dan menghancurkan pemerintah RI sebagai wujud kebencian atas penipuan yang terjadi.

Dr. M., Isa Sulaiman menulis buku berjudul *Aceh Merdeka, Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Pustaka Al-Kautsar pada tahun 2000. Dalam buku tersebut penulis menggambarkan sebab munculnya GAM, sasaran perjuangan, dan ideologi perjuangan yang ada perbedaan dengan perjuangan DI/TII. Penulis juga sempat melacak gol akhir dari perjuangan GAM babak pertama yang kemudian berakhir dengan

perundingan awal dan tidak tercapai tujuan dan cita-cita dasar pendiri GAM, Hasan Tiro.

Murizal Hamzah penulis buku berjudul “Hasan Tiro: Jalan Panjang Menuju Damai Aceh” yang diterbitkan oleh Bandar Publishing tahun 2016 menggambarkan bagaimana Hasan Tiro mendirikan Aceh Merdeka dengan bersusah payah, kemudian bagaimana pemikiran politik Hansan Tiro sehingga berpengaruh terhadap para pengikutnya. Selain itu buku yang lumayan tebal tersebut juga mengkisahkan romantisme perdamaian antara GAM dengan RI di Finlandia tahun 2005 sehingga Aceh kembali aman sampai hari ini.

Masih banyak buku-buku yang berkaitan dengan gerakan DI/TII dan GAM yang tidak mungkin kami sebut semuanya di sini, yang tersebut di sini kiranya menjadi sampel dan dapat mewakili buku-buku lainnya untuk menyatakan bahwa judul penelitian yang kami pilih di sini sampai hari ini belum kami dapati dalam peredaran. Oleh karenanya sangat berkepentingan kami mengambil judul ini untuk mengkaji dan mendapati data-data akurat untuk laporan penelitian nantinya sebagai laporan akhir penelitian ini.

Dari *literature review* yang telah ada kami mencoba untuk mewujudkan kerangka teori dalam laporan hasil penelitian ini nantinya yang selaras dengan konsep kerangka teori itu sendiri. Upaya utama untuk mewujudkan kerangka teori tersebut kami mulai dari upaya mendapatkan variable-variabel dalam penelitian kemudian memadukannya dalam tulisan yang berhubungan dengan judul dan rumusan masalah pada penelitian ini.

Perlu dikolaborasikan data yang diperoleh terkait antara persamaan gerak dan gerakan antara DI/TII dengan GAM dalam rangka melawan pemerintah RI. Dari persamaan tersebut dapat diambil hasilnya apa tujuan kedua gerakan tersebut muncul dan melawan RI. Selain itu tidak boleh tidak dan mesti dikomparasikan jenis, model, metode, dan strategi yang digunakan kedua gerakan untuk melawan RI sehingga di sana akan muncul hasil perbedaan prinsipil dalam artian perbedaan tujuan pemberontakan dengan cara dan strategi perlawanan yang memang ada bedanya.

Dari situlah semua itu berawal sehingga terbentuk kerangka teoritis dalam penelitian ini sebagai bahagian yang tidak dapat dipisahkan dengan judul penelitian, abstrak penelitian, tujuan penelitian, rumusah masalah penelitian, dan juga sampai kepada kesimpulan penelitian nantinya. Semua itu termasuk kedalam kerangka teori penelitian yang mesti wujud dalam sesuatu proposal penelitian sebagai syarat kesempurnaan proposal dan penelitian itu sendiri.



BAB TIGA METODE PENELITIAN

Untuk menentukan metode penelitian terhadap sesuatu penelitian tidaklah mudah sebagaimana membalik telapak tangan yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Calon peneliti haruslah menguasai ilmu riset terlebih dahulu baru mampu dan sanggup meletakkan metode penelitian dalam penulisan karya ilmiahnya. Kalau tidak demikian maka tidak tertutup kemungkinan salah dalam penentuan metodologi penelitian nantinya. Pemahaman seseorang peneliti terhadap metode penelitian dalam sebuah karya ilmiahnya mestilah selaras dan sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak boleh mengikat diri secara brutal dengan pemahaman lama yang sifatnya rigid/kaku dan tidak berkembang.

Metode penelitian menjadi alat ukur yang paling representatif untuk sesuatu penelitian ilmiah berkenaan dengan prosedur dan teknik yang dipilih dalam

melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ilmiah semacam ini kami memilih metode penelitian yang lazim digunakan kebanyakan para peneliti ilmu sosial yaitu metode penelitian kualitatif, metode ini berkenaan langsung dengan penelitian ilmu-ilmu sosial yang tidak menghendaki rumus dan kalkulasi matematis seperti ilmu eksakta yang dalam setiap penelitiannya menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Yang dimaksudkan dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau secara lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan demikian penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penulisan ini sangatlah relevan dan representatif untuk sebuah penelitian ilmu sosial seperti ini.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif-analisis yakni suatu langkah yang bertujuan untuk memusatkan pada pembahasan dan pembedahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif. Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskripsikan secara faktual dan akurat tentang “Komparasi eksistensi dan aplikasi syari’at Islam zaman perjuangan GAM dengan gerakan DI/TII di Aceh”

Untuk memperoleh data akurat dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian

lapangan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai responden, untuk mengobservasi dan memantau kehidupan masyarakat yang dapat dikumpulkan data secara jelas dan transparan.

Sementara penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh pengetahuan dan data sekunder sebagai penunjang pembahasan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, pendapat-pendapat para ahli dan undang-undang yang tentunya berkaitan dengan judul penelitian ini. Di samping itu, berbagai teori tentang kebudayaan dan mata rantai intelektual dapat ditelusuri dalam bahan pustaka, baik dari sumber literatur dan sejenisnya maupun dari sumber lainnya, seperti CD dan *website*.

Dalam pelaksanaannya suatu penelitian, data merupakan bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dan *interview* (wawancara). Sementara observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data

(pewawancara) dengan sumber data (responden). Teknik wawancara yang dimaksud di sini adalah pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Untuk memperoleh data melalui jalur wawancara peneliti akan mewawancarai sejumlah tokoh, para pelaku politik, pihak legislatif, eksekutif, masyarakat dalam kategori ulama/intelektual yang ada di peringkat kecamatan dan gampong.

Pihak-pihak yang akan diwawancarai antara lain adalah: pelaku sejarah yang terlibat langsung dengan gerakan DI/TII dan GAM, sejarawan (ilmuan sejarah) baik di kampus maupun luar kampus, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat serta tokoh politik yang berkapasitas dan memiliki kemampuan tentang judul penelitian ini, dan keluarga para pelaku sejarah yang memahami aktivitas orangtua/saudara mereka dalam dua peristiwa tersebut.

Penelitian ini insya Allah akan mengambil lokasi penelitiannya di tiga kabupaten di Aceh yang dianggap menjadi basis utama dua gerakan perjuangan masyarakat Aceh (DI/TII dan GAM) terhadap pemerintah Indonesia. Lokasi yang dimaksudkan di sini adalah kabupaten Pidie, kabupaten Pidie Jaya, dan kabupaten Bireuen. Tiga kabupaten tersebut dominan pejuang DI/TII dan GAM sejak mulai perjuangan mereka sampai berakhirnya, dan tiga kabupaten tersebut juga merupakan kabupaten-kabupaten yang padat penduduk.

Untuk memudahkan dilaksanakan pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa instrument pengumpulan data seperti buku, kertas, pulpen, pensil, kamera, laptop, dan *questionire*. Data-data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan keakuratan data yang aktual dan faktual. Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.



BAB EMPAT

PERJUANGAN DI/TII DAN GAM DALAM LINTASAN SEJARAH

A. LATAR BELAKANG MUNCULNYA PEMBERONTAKAN DI/TII

Gerakan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) lahir pertama sekali pada tanggal 7 Agustus 1949 (12 syawal 1368 Hijriah) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di sebuah kampung yang berada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat.³Gerakan ini lahir sebagai jawaban terhadap para penguasa Indonesia pada masa awal kemerdekaan yang sangat ambivalen dalam bersikap ketika menetapkan dasar negara dan merumuskan konstitusi negara. Diperparah lagi dengan eksistensi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang juga mendominasi penguasaan

3 <http://www.nafiun.com/2014/03/pemberontakan-ditii-di-indonesia.html>

rakyat tani dan rakyat buruh sehingga eksistensi Republik Indonesia (RI) yang dihuni oleh lebih dari 90 % umat Islam tatkala itu seperti negara berideologi komunis.

Tujuan didirikan gerakan DI/TII adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Di dalam negara Indonesia akan dipraktikkan hukum Islam dan menolak semua ideologi lain hidup dan berkembang di Indonesia. Proklamasi Negara Islam Indonesia (NII) menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban negara untuk membuat undang-undang berdasarkan syari'at Islam, dan menolak keras terhadap ideologi selain Islam yang berdasarkan Al Qur'an dan Hadist, atau yang sering mereka sebut dengan hukum kafir.⁴

Tujuan utama lahirnya DI/TII tersebut sangat sinkron dengan keinginan para tokoh dan pemimpin serta rakyat di Aceh sehingga Aceh ikut bergabung dalam Negara Islam Indonesia (NII) yang berpusat di Jawa Barat tersebut. Pemberontakan DI/TII di Aceh dimulai pada tanggal 20 September 1953. Dimulai dengan pernyataan Proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia oleh Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh, proklamasi itu menyatakan diri bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) dibawah kepemimpinan Imam Besar NII Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.⁵

Ada alasan sangat mendasar yang menjadi latar belakang dari munculnya gerakan DI/TII Aceh adalah kekecewaan rakyat dan para tokoh masyarakat di Aceh

4 <http://www.nafiun.com/2014/03/pemberontakan-ditii-di-indonesia.html>

5 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_DI/TII_di_Aceh

karena dileburnya provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara yang beribukota di Medan. Peleburan provinsi itu seakan mengabaikan jasa baik masyarakat Aceh ketika perjuangan mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia dimasa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia (1945-1950). Selain itu ada kekhawatiran kembalinya kekuasaan para Uleebalang yang sejak lama telah menjadi pemimpin formal pada lingkup adat dan politik di Aceh yang diberikan kesempatan oleh penjajah Belanda. Karena Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno tidak menggunakan Hukum Islam sebagai hukum negara maka keinginan dari masyarakat Aceh untuk menetapkan hukum syariah dalam kehidupan mereka menjadi penyebab dan alasan lain gerakan rakyat tersebut muncul kepermukaan. Sejarawan berkebangsaan Belanda, Cornelis Van Dijk, menyebutkan, kekecewaan Teungku Muhammad Dawud Beureu-étherhadap Jakarta semakin berat dengan beredarnya rumor tentang sebuah dokumen rahasia dari Jakarta. Dokumen itu disebut-sebut dikirim oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang isinya berupa perintah pembunuhan terhadap 300 tokoh masyarakat Aceh. Rumor ini disebut sebagai les hitam. Perintah tersebut dikabarkan diambil oleh Jakarta berdasarkan kecurigaan dan laporan bahwa Aceh sedang bersiap untuk sebuah pemberontakan guna memisahkan diri dari negara Indonesia.⁶

Mr. SM. Amin menyebutkan ada tiga perkara yang menyebabkan lahirnya gerakan DI/TII di Aceh dalam bingkai Negara Islam Indonesia (NII) yang dimotori oleh ulama kharismatik dan pemimpin PUSA,

6 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_DI/TII_di_Aceh

Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh. Ketiganya adalah: persoalan-persoalan di sekitar peristiwa Cumbok, tuntutan provinsi Aceh yang telah dileburkan menjadi bahagian dari provinsi Sumatera Utara, dan ketidaksesuaian beberapa peraturan hukum antara RI dengan Aceh dan masyarakatnya. Selain itu Mr. SM. Amin juga menyebutkan ada persoalan-persoalan kecil lainnya yang menyatu dengan persoalan besar sehingga paradoks dan konflik antara Aceh dengan RI semakin lebar.⁷

Sebagaimana diketahui bahwa di Aceh pernah terjadi satu peristiwa berdarah di penghujung tahun 1945 yang berhadapan antara kaum Uleebalang dengan rakyat yang disebut dengan Perang Cumbok. Dikatakan Perang Cumbok karena peristiwa tersebut terjadi di gampong Cumbok, Lamlo, kecamatan Kota Bakti, kabupaten Pidie. Kaitannya Perang Cumbok dengan kebangkitan gerakan DI/TII menurut beberapa sumber adalah; ada kekhawatiran lahir kembali kekuatan kaum Uleebalang untuk memimpin negeri seperti yang pernah terjadi masa penjajahan oleh Belanda. Pada masa penjajahan kaum penjajah Belanda memberikan posisi-posisi strategis dalam pemerintah di Aceh kepada kaum Uleebalang sehingga mereka berkuasa penuh terhadap rakyat yang sedang dijajah Belanda.

Kekhawatiran hal yang sama akan diperlakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Aceh sehingga kaum Uleebalang akan menjadi pemegang kebijakan dan pengatur serta penguasa penuh di Aceh. Karena itulah kaum ulama modern di bawah kepemimpinan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) bersama rakyat berusaha keras

7 Mr. SM. Amin, Sekitar Peristiwa Berdarah di Aceh, Jakarta: Soeroengan, hlm.,135.

untuk menghambat kemungkinan tersebut sehingga ia tidak terjadi. Untuk menghambat kemungkinan terjadinya keadaan seperti itu tidak ada jalan yang paling jitu pada waktu itu selain berontak melawan Republik Indonesia yang sangat diskriminatif terhadap Aceh dan bangsa Islam di Aceh. Ketika gerakan DI/TII terjadi di Aceh semua pihak sibuk dengan issue tersebut sehingga tidak ada waktu untuk mengembalikan posisi kaum Uleebalang menjadi kaki tangan pemerintah seperti yang pernah terjadi pada masa penjajahan Belanda di Aceh.

Kekhawatiran tentang peristiwa Cumbok juga terkait dengan kondisi masyarakat Aceh yang sangat dikhotomis ketika kaum Uleebalang mendapatkan kekuasaan dari penjajah Belanda sehingga kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama di Aceh sangat ngaur dan amburadul. Menghindari wujudnya kondisi serupa maka oleh para pejuang Islam dari kalangan para ulama modern mengisyharkan gerakan perlawanan terhadap RI yang bernama DI/TII pada tahun 1953. Dalam hal ini Aceh bergabung dengan induknya DI/TII yang duluan diisyharkan Kartosuwiryo di Jawa Barat tanggal 7 Agustus 1949 (12 syawal 1368 Hijriah).

Permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan munculnya pemberontakan DI/TII di Aceh adalah kebijaksanaan yang tidak bijaksana, kebijakan yang tidak bijak, dan ke'arifan yang tidak 'arif dilakukan pemerintah Republik Indonesia membubarkan provinsi Aceh dan menggabungkannya dengan provinsi Sumatera Utara. Persoalan ini menjadi causa prima munculnya DI/TII di Aceh sehingga terjadi korban besar-besaran dari kedua

belah pihak (Aceh dan Indonesia).

Digambarkan dalam beberapa buku sejarah bahwa ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Hindia Belanda untuk membatasi sepuluh provinsi di Indonesia, kalau lebih dari sepuluh maka harus dianulir dan dihilangkan status provinsi untuk dijadikan wilayah residen saja. Dengan berbagai pertimbangan yang dipertimbangkan oleh pemerintah Republik Indonesia maka provinsi Aceh menjadi korban, dihapus, dihilangkan, Aceh dijadikan wilayah Residen saja yang dimasukkan kedalam wilayah provinsi Sumatera Utara.

Dalam pendapat lain dikisahkan bahwa pembubaran provinsi Aceh dan penggabungannya dengan provinsi Sumatera Utara ada kaitannya dengan politik partai Islam terbesar tatkala itu, yaitu Majelis Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI). Partai ini menginginkan dapat suara besar dari Sumatera Timur, dan di wilayah tersebut yang muthlak ummat Islam hanya ada di Aceh. Kalau Aceh yang dihuni muslim satu provinsi dan Sumatera Utara yang muslimnya minoritas dan tidak sebanding dengan Aceh satu provinsi sendiri, maka ketika pemilihan umum (Pemilu) terjadi MASYUMI diperkirakan hanya dapat memperoleh suara banyak di Aceh saja, sedangkan di Sumatera Utara partai MASYUMI bakal mengalami kemunduran para pemilihnya.⁸ Untuk mengatasi persoalan tersebutlah maka oleh para tokoh MASYUMI yang tengah berkuasa waktu itu memutuskan untuk meleburkan provinsi Aceh dan

8 Untuk kejelasannya silakan lihat; Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992., hlm. 134. M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh*, Jakarta: Gunung Agung, 1986, hlm. 53-54. Nazaruddin Syamsuddin, *The Republican Revolt*, 1985, hlm. 193.

meleburkannya kedalam provinsi Sumatera Utara.

Penyebab ketiga munculnya Gerakan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh adalah; adanya ketidak sesuaian beberapa ketentuan hukum dengan jiwa masyarakat Aceh.⁹Ketika kita membaca sejarah Aceh dengan komprehensif maka kita dapati yang dimaksud ketidak sesuaian beberapa ketentuan hukum di sini adalah lebih dominan kepada pemberlakuan syari'at Islam untuk Aceh. Dahulu ketika Indonesia diinvasi kali kedua oleh Belanda tahun 1948 yang membuat Indonesia kehilangan presiden dan wakil presiden karena ditangkap Belanda, kehilangan ibukota karena sudah diduduki Belanda, yang tersisa adalah Aceh sebagai wilayah bebas pendudukan Belanda. Bersamaan dengan kondisi seperti itu presiden Soekarno pernah berjumpa pemimpin besar dan ulama kharismatik Aceh; Teungku Muhammad Dawud Beureu'eh meminta bantuan agar rakyat Aceh membantu dan membela Indonesia yang masih bayi pada waktu itu.

Dalam dialog antara kedua tokoh bangsa tersebut, Soekarno berjanji akan memberikan pemberlakuan Syari'at Islam bagi Aceh manakala Indonesia sudah bebas dari invasi kedua Belanda tersebut atas bantuan Aceh. Ketika Indonesia dipertahankan mati-matian oleh bangsa Islam Aceh di front Medan Area di Sumatera Timur, Radio Rimba Raya mengudara di Krueng Simpo Kecamatan Juli kabupaten Bireuen, dan dengan siaran tersebut PBB mengetahui bahwa Aceh masih gigih melawan Belanda yang bermakna Indonesia masih wujud di permukaan dunia. Waktu itulah PBB menolak klaim Belanda yang mengatakan sudah menguasai kembali Indonesia dan

9 Mr. SM. Amin, *Op. Cit*, hlm. 135.

mengakui kedaulatan Indonesia berkat perjuangan bangsa Islam Aceh, penyiaran Radio Rimba Raya, sumbangan pesawat terbang untuk Indonesia, suplai bantuan penuh kepada Agus Salaim sebagai duta keliling Indonesia seluruh dunia, membiayai L. N. Palar sebagai duta Indonesia di India, dan sebagainya.

Ketika Indonesia lepas dari jajahan Belanda dan kepemimpinan negara sudah stabil kembali, Soekarno bukan hanya tidak memberikan implementasi syari'at Islam untuk Aceh melainkan ia berpidato di mana-mana seraya menolak berlakunya hukum Islam di wilayah Indonesia. Pidato itulah yang membuat ummat Islam Indonesia terutama sekali ummat Islam Aceh merasa sedih dan sakit hati karena Indonesia dimerdekakan oleh ummat Islam tetapi hukum Islam bagi ummatnya ditolak presiden Soekarno berlaku di dalamnya.

Dalam menafsirkan Pancasila sebagai dasar negara, Soekarno berpolitik dengan ummat Islam Indonesia yang sudah memerdekakan republik ini. Ia mengatakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang memungkinkan muslim di Indonesia mengisinya dengan nilai-nilai Islam, dengan demikian maka jadilah negara Indonesia ini sebagai negara yang Islami walaupun tidak secara formal disebut dengan negara Islam. Seperti itulah Soekarno berkilah untuk dapat menggeserkan Islam sebagai dasar negara dan syari'ah sebagai hukumnya. Walaubagaimanapun, Soekarno sering bicara tidak konsisten dan tidak istiqamah dalam pembicaraannya. Pada awal masa revolusi Soekarno pernah berbicara di Aceh: Pancasila adalah milik kita dan wadah yang kita isi, jikalau kita isi dengan Islam maka

Islamlah negara kita. Namun demikian ketika berada di Amuntai Kalimantan Selatan ia berkata lain lagi: “kalau Indonesia menjadi negara Islam kita akan hancur berantakan”.¹⁰

Pada masa yang berbeda Soekarno juga berpidato di kampus Universitas Indonesia (UI) di Salemba, di sana ia mengatakan: “tidak mungkin kita menjalankan hukum Islam di Indonesia karena bagaimana saudara kita yang Kristen di Ambon dan yang hindu di Bali. Ucapan serupa juga dikatakan di Amuntai ketika ia berada di sana. Pidato-pidato tersebut mencerminkan bahwa Soekarno anti Islam dan anti hukum Islam, ketika didesak oleh mayoritas ummat Islam ia membela diri dengan berpidato dalam kuliah umum di Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 1953 yang diberi judul: “Negara Nasional dan cita-cita Islam”.

Dalam pidato Soekarno di kampus UI tersebut menjelaskan empat poin mendasar tentang negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu: pertama; Islam mempunyai cita-cita kenegaraan. Kedua; Islam tidak hanya sekedar mengatur hubungan antara manusia dengan Allah saja yang disebut dengan *hablumminallah* yaitu persoalan ibadah dan kepercayaan saja, melainkan Islam mengatur juga persoalan kehidupan dan hubungan manusia dengan sesama manusia atau masyarakat yang disebut dengan *hablumminannas* sehingga Islam bukan saja sebuah agama melainkan juga sebagai *way of life* yang mengatur segala persoalan kehidupan ummatnya. Ketiga; Islam tidak memisahkan gereja dari negara sebagai agama Kristen,

10 Dr. Ija Suntana, M. Ag, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm., 39-40.

tetapi agama dan negara menurut Islam adalah bersatu dan sejalan. Walaupun demikian Islam tidak membenarkan teokrasi karena dalam Islam tidak ada tingkatan kepadrian sebagaimana dalam agama Kristen. Keempat; negara Islam menjamin kemerdekaan kepercayaan agama-agama lain dan memberi persamaan hak antar sesama rakyat.¹¹

Cuplikan gambaran pemikiran yang bernuansa sekularisme dan nasionalisme dari Soekarno tersebut ternyata menyatu dan membaaur dalam kehidupannya sepanjang sejarah kehidupannya pula. Dari pemikiran tersebutlah terpetik sikap anti Syari'at Islam untuk Aceh yang pernah dijanjikan dahulu ketika ia hampir hilang jabatannya dan Indonesia hampir hilang dalam peta dunia manakala diinvasi Belanda. Ketika ia tidak memberi izin kepada masyarakat Aceh untuk menjalankan syari'at Islam sebagai hukum Allah maka pada masa itulah muslim Aceh bangkit bergabung dengan gerakan DI/TII melawan kedhalimannya sehingga memperoleh kerugian besar bagi negara dan bangsanya.

Secara konkrit dan rinci latar belakang lahirnya gerakan DI/TII di Aceh dilatarbelakangi oleh permasalahan dan persoalan yang sangat kompllit.¹² Penyebab-penyebab tersebut dapat dielaborasikan sebagai berikut:

- (1). Soekarno mengingkari janji dengan bangsa Indonesia untuk menjalankan hukum Islam di negara yang ketika itu berpenduduk lebih dari 90 % Muslim dan

11 *Ibid.*

12 Untuk kejelasan dan kesempurnaan penyebab-penyebab terjadinya gerakan DI/TII di Aceh silakan baca; Hasanuddin Yusuf Adan, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dan sejarah pemberontakan di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, edisi revisi, 2017, hlm.,

dimerdekakan oleh ummat Islam dari penjajah Belanda dan Jepang. Dalam masa perjuangan fisik baik Soekarno maupun para pejuang dan rakyat lainnya seragam mengumandangkan kalimah tauhid *Laailahaillallah* dan takbir Allahu Akbar ketika berperang di medan jihad. Namun ketika Indonesia merdeka, negara Indonesia dijadikan negara nasional yang praktik kenegaraannya bersifat sekuler. Ini merupakan satu putarbelit kesungguhan jihad rakyat dengan pemahaman sekularisme-nasionalisme oleh Soekarno.

- (2). Soekarno tidak menepati janjinya dengan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh untuk menjadikan Aceh sebagai sebuah daerah otonomi yang memberlakukan hukum Islam secara penuh di dalamnya. Ingkar janji Soekarno terhadap Aceh tersebut merupakan sebuah penghinaan terhadap bangsa Islam Aceh yang populer dengan masyarakat Islamis. Dan itulah penyemaian bibit-bibit pemberonatak yang sengaja disemai dan ditanam serta disiram dan dipapah oleh Soekarno dengan maksud dan tujuan tertentu bagi pemenuhan hasrat sekularisasinya dan pemenuhan permintaan para majikannya. Semestinya sebagai seorang muslim yang memiliki power dan kekuasaan sebagai seorang kepala negara, Soekarno yang memimpin sebuah negara besar dengan penduduk muslim terbesar di dunia waktu itu wajib menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan bersinergi dengan para ulama dan semua pihak untuk menjadikannya sebagai *rule of model* di dunia raya. Namun impian para mujahidin, mujahidah, serta pejuang-pejuang tangguh yang telah berhasil mempertahankan negara Indonesia dari

jajahan penjajah Erapah menjadi sirna ibarat mimpi di siang bolong. Semoga Allah memberikan balasan kepada hambaNya sesuai dengan amalannya.

- (3). Dengan terang-terangan Soekarno mendukung, membantu dan berpihak kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) serta menghina Islam. Satu tamparan hebat dan dahsyat dari Soekarno terhadap ummat Islam Indonesia adalah; mendukung dan memperjuangkan secara terang-terangan ideologi komunis-atheis melalui Partai Komunis Indonesia (PKI). Untuk melegalkan hasrat tersebut Soekarno menciptakan satu ideologi baru campuran dari ideologi nasionalisme dengan ideologi Islam dan ideologi komunisme yang dipasung dalam format bernama NASAKOM (Nasional, Agama, dan Komunis). Nasionalisme diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), Agama diwakili oleh partai Nahdhatul Ulama (NU), dan Komunisme diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Penciptaan NASAKOM tersebut membuktikan bahwa Soekarno tidak sayang Islam, tidak cinta Islam, dan bahkan berupaya menghancurkan Islam. Gerakan yang disemainya dahulu kala kini tumbuh berkembang dan dipapah oleh generasi penerusnya seperti Ripka Ciptaning yang menulis buku: Aku Bangga Jadi Anak PKI, Anak PKI Masuk Parlemen, Lima Puluh Tahun Gerakan PKI dan kawan-kawannya yang lain.
- (4). Mengenyampingkan syari'at Islam dengan menjalankan sistem pemerintahan sekuler yang sangat dibenci Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh khususnya di Aceh. Khusus untuk Aceh kenapa harus memberontak

terhadap Indonesia lewat gerakan DI/TII karena presiden Soekarno dengan sengaja mengenyampingkan Hukum Islam dengan mengamalkan praktik sekuler di dalam negara Indonesia. Dengan kelihaihan bermain lidah Soekarno berusaha menggunakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai pegangannya untuk menyisihkan Islam dan syari'at Islam di Indonesia yang berpenduduk lebih 90 persen muslim pada masa awal kemerdekaan dahulu. Sikap sekuler Soekarno seperti itu sangat bertentangan dengan watak Islami ulama dan pemimpin besar Aceh; Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh. Itu menjadi salah satu penyebab lahirnya gerakan DI/TII di bumi Aceh.

- (5). Mengacau balaukan struktur pemerintahan di Aceh dengan memindahkan putra-putra terbaik Aceh keluar Aceh dan menggantikannya dengan orang-orang dari daerah lain yang sebahagian mereka non muslim. Langkah itu seperti sengaja dilakukan pemerintah Indonesia di Jakarta untuk mengacau balaukan kekuatan Islam dalam pemerintah Aceh yang didominasi para kader-kader PUSA yang kuat berpegang kepada Islam dan hukum Islam. Analisa tersebut kemudian tepat ketika sebahagian para pendatang dari luar Aceh tersebut bikinulah di Aceh dengan menghidupkan pasar malam guna membaurkan lelaki dengan perempuan tanpa batas, melegalkan penyebaran minuman keras, mendatangkan wanita-wanita pekerja sek komersial dari luar Aceh ke Aceh, dan seumpamanya.
- (6). Menurunkan pangkat dan jabatan Kolonel Husin Yusuf sebagai orang PUSA dari jabatannya sebagai panglima

Divisi X menjadi Komandan Brigade dengan pangkat Letnan Kolonel pada pertengahan tahun 1950. Brigade ini kemudian diletakkan dibawah kekuasaan Panglima Bukit Barisan pimpinan Kawilarang.¹³ Seterusnya Husin Yusuf diberhentikan dari tugasnya. Perlakuan yang mengandung unsur penghinaan terhadap Kolonel Husin Yusuf tersebut merupakan sikap kacang lupakan kulitnya, mengingat Husin Yusuf merupakan pendiri dan pembangun Radio Rimba Raya yang menjadi modal utama kemerdekaan Indonesia ketika radio tersebut menyebarkan informasi lewat udara bahwa Aceh masih berperang melawan penjajahan Belanda di front Medan Area. Informasi tersebut diterima oleh radio India di New Delhi dan seterusnya disebarkan sampai kepada PBB. Lewat siaran itulah PBB tau kalau Indonesia masih wujud dengan pertahanan muslim dan mujahidin Aceh. Tetapi Husin Yusuf didiskriminasikan pemerintah Indonesia.

- (7). Pemandahan Ketua Polisi Aceh Muhammad Insa, dan Komisariss Muda Polisi, Yusuf Effendi ke Medan merupakan suatu tamparan hebat bagi Aceh.¹⁴ Pemandahan ini merupakan upaya diskriminasi pihak Indonesia terhadap Aceh tanpa belas kasihan, dua putera terbaik Aceh dipindahkan ketempat lain agar jauh dari induk negerinya yang bernuansa syari'ah. Ketika orang lain yang didatangkan sebagai pengganti sudah barang tentu tidak akan sama keyakinan pembelaan terhadap Islam dan Aceh. Prilaku Indonesia

13 Hasan Saleh, *Op Cit*, hlm. 125-126. M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh*, Jakarta: Gunung Agung, 1986, hlm. 24.

14 M. Nur El Ibrahimy, *Ibid*.

terhadap Aceh seperti ini membuat para penguasa Aceh asal Aceh bersedih hati karena sudah berpisah dengan patner kerjanya.

- (8). Pemandahan semua batalyon tentera yang dipimpin putera Aceh keluar Aceh dan digantikannya oleh orang luar yang kebanyakannya bukan muslim,¹⁵ seperti pemandahan Mayor Hasballah Haji ke Tarutung, Tapanuli yang diganti oleh Leftenan Kolonel Nazir (Komunis). Batalyon T. Banyak dipindahkan ke Jawa Barat, Batalyon Alamsyah ke Indonesia Timur, Batalyon Hasan Saleh ke Sulawesi Selatan kemudian ke Maluku Selatan, dan Batalyon Nyak Adam Kamil pun segera dihijrahkan dari bumi Aceh. Sebagai penggantinya didatangkan sejumlah Batalyon dari Tapanuli seperti Batalyon Manaf Lubis, Batalyon Ulung Sitepu (Komunis), dan Batalyon Boyke Nainggolan.

Perbedaan dalam kehidupan sehari-hari antara pihak yang dipindah dengan pihak yang menggantikannya sudah sangat transparan sekali sehingga masyarakat Acehlah yang menerima imbasnya. Orang-orang Tapanuli ini bukan hanya beda agama dengan orang Aceh, akan tetapi cara kerja mereka pun sangat jauh daripada kebiasaan dan akhlak orang Aceh. Mereka memasuki Masjid dengan sepatu berlumpur, menampakkan kemaluan kepada orang perempuan, meminum arak di khalayak ramai. Kerja-kerja seperti ini bukanlah kesilapan dan ketidaksengajaan sebahagian Tentera Nasional Indonesia (TNI), melainkan sebuah usaha untuk mensosialisasikan

15 P. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Grafiti Pers, 1983, hlm. 282.

sesuatu itu wujud di sesuatu tempat. nampaknya seperti telah diprogramkan lebih awal oleh Komandan Brigade Letnan Kolonel Nazir yang sangat benci wujudnya pemerintahan PUSA (Ulama) di Aceh. Dan usaha ini pula disengaja untuk memancing kemarahan bangsa Aceh, dengan demikian sudah ada alasan bagi Jakarta untuk menghancurkan Aceh dari sebuah propinsi yang Islami dan menjadikannya sebuah propinsi sekuler sebagaimana halnya dengan propinsi-propinsi lain.¹⁶Sudah lazimlah upaya dan kerja militer semacam itu dan sudah maklum kalau itu kerja jahat untuk meneror masyarakat agar menjadi takut.

- (9). Pembubaran Propinsi Aceh oleh Perdana Menteri Muhammad Nasir dari MASYUMI yang dibaca dan disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kutaraja pada tanggal 23 Januari 1951, menjadi puncak dan sebab utama meletusnya peristiwa berdarah di Aceh.¹⁷ Dalam versi Ibrahimy, Propinsi Aceh dibubarkan pada 14 Agustus 1950 oleh Kabinet Halim yang berkedudukan di Yogyakarta dengan Peperpu No 5 tahun 1950 yang ditandatangani oleh pemangku jawatan Presiden RI Mr. Assat dan Mendagri RI Mr. Soesanto Tirtoprojo.¹⁸ Di antara sekian penyebab meletusnya pemberontakan di Aceh, persoalan pembubaran Propinsi ini menjadi penyebab utama

16 Hasan Saleh, *Op Cit*, hlm.136. M. Nur El Ibrahimy, *Ibid*.

17 Hasan Saleh, *Op Cit*, hlm.134. M. Nur El Ibrahimy, *Op Cit*, hlm.53-54. Nazaruddin Syamsuddin, *The Republican Revolt*, 1985, hlm. 193.

18 M. Nur El Ibrahimy, "Catatan tentang Pemberontakan Kaum Republik", *Serambi Indonesia*, Sabtu 13 Agustus 1994. hlm. 4. Informasi lebih lanjut tentang perkara ini silakan baca A. Hasamy, "Dari Khazanah Masa Lalu: Lahir dan Leburnya Propinsi Aceh I", *Waspada*, Kamis 15 Desember 1983.

dalam pandangan masyarakat kita.

Pembubaran propinsi ini lebih didominasi oleh kepentingan politik MASYUMI, dengan perkiraan kalau Aceh tetap menjadi satu propinsi maka partai Islam ini akan menang mutlak di Aceh dan kalah total di Sumatera Utara yang banyak orang Kristen. Untuk mempertahankan kemenangannya di Sumatera maka pimpinan-pimpinan partai tersebut berusaha keras menggabungkan Aceh dengan Sumatera Utara dengan menghilangkan status propinsi.¹⁹ Untuk mengelak jagan cemar reputasi (nama baiknya), mereka beralasan bahwa ketentuan Konferensi Meja Bundar di Denhaag menetapkan Indonesia menjadi sepuluh propinsi saja, sebenarnya itu bukan suatu ketentuan mutlak. Sesungguhnya sasaran dan target Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dari pemberontakan tersebut adalah terwujudnya *Daulah Islamiyyah* di bumi Aceh setelah melihat tidak mungkin untuk seluruh Indonesia. Semua skenario Allah tersebut sudah berlalu sedemikian rupa sehingga ianya hanya bisa menjadi pengalaman dan pelajaran untuk generasi hari ini, tiada yang dapat dilakukan generasi kini untuk menebus keteledoran generasi dulu selain menyerahkan kepada Allah dan berusaha keras untuk melakukan yang terbaik daripada itu.

- (10). Suatu peristiwa yang sangat pahit dan pedih bagi bangsa Aceh di bawah pimpinan kaum ulama adalah, Razia Agustus 51 atau Razia Sukiman yang menginjak-injak kehormatan kaum ulama sekaligus bangsa Aceh yang

19 Wawancara dengan Dr. Safwan Idris, Banda Aceh pada 3 Agustus 1997.

dahulu pernah menjadi pionir (pelopor) kemerdekaan Republik Indonesia. Razia ini diperintahkan Perdana Menteri Dr. Sukiman di seluruh negara untuk mencari sisa-sisa senjata simpanan anggota Komunis. Di wilayah lain, perintah itu dilaksanakan dengan baik dan tepat, yaitu tentera-tentera Nasional menyita sejumlah senjata yang disembunyikan bekas orang Komunis. Sebaliknya, di Aceh orang-orang Komunis sendiri yang masih aktif dalam TNI yang mencari-cari kesalahan dan menangkap para ulama PUSA serta menggeledah dan memeriksa rumah-rumah penduduk dengan alasan mencari senjata simpanan.

Strategi yang diterapkan untuk dapat menangkap mereka, tentera-tentera Republik lebih dahulu menaburkan sejumlah peluru ke dalam kandang ayam, kandang kambing, kandang lembu atau kandang kerbau orang yang mau ditangkap di malam hari. Dengan demikian menjadi alasan yang cukup kuat untuk menangkap pemilik rumah yang mereka rencanakan karena terdapat sejumlah peluru di rumah mereka. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk menangkap mereka yang tidak bersalah, sebab semua senjata yang dimiliki bekas pejuang kemerdekaan di Aceh telah dikumpulkan oleh Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh ke dalam wadah TNI ketika beliau menjadi Gubernur Militer. Cara-cara jahat seperti itu sampai hari ini masih tersisa dan dipraktikkan Jakarta terhadap Aceh terutama sekali dalam kasus Gerakan Aceh Merdeka ketika Jakarta memberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 1989-1998 dan Darurat Militer serta Darurat Sipil tahun 2003-2005.

Banyak bekas-bekas pejuang kemerdekaan dan kaum ulama yang jelas tidak bersalah telah dipenjara di beberapa tempat, rumah-rumah mereka diperiksa secara kejam dan biadap. Bahkan ketiga rumah Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh pun di obrak abrik (diperiksa) dengan cara yang sangat kasar. Semua ini dilakukan oleh TNI atas perintah Nazir yang berusaha membalas dendam atas tahanan rumah yang dahulu dijatuhkan Gubernur Militer terhadapnya karena selalu melanggar perintah Komandan Divisi. Kerja-kerja tersebut semakin berani dilakukan karena mendapat bantuan dan *support* yang sangat kuat dari pihak sisa-sisa feodal (Ulèèbalang) di Aceh.²⁰

Peristiwa terakhir ini telah menyempurnakan kemarahan orang Aceh yang telah mengorbankan jiwa raga, harta dan nyawa untuk mewujudkan sebuah republik yang ketika itu hampir mustahil terwujud tanpa adanya kerja keras daripada cucu-cucu Sultan Iskandar Muda di ujung barat pulau Sumatera. Bak kata pepatah: “air susu dibalas dengan air tuba”, dan “habis manis sepah dibuang”. Begitulah adanya perlakuan Republik Indonesia terhadap bangsa Islam Aceh yang pernah memodali, membantu, membiayai, dan mempertahankan Indonesia dari carut marut, dari penjajahan dan dari kemiskinan yang pernah dialaminya.

- (11).Penarikan mobil dinas yang sedang dipakai Gubernur Aceh Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh secara kasar oleh Gubernur Sumatera Utara Abdul

20 Hasan Saleh, *Op Cit*, hlm. 137 - 147. M. Nur El Ibrahimy, *Op Cit*, hlm. 72 - 74.

Hakim merupakan satu pukulan berat bagi Aceh dan masyarakatnya.

Akibat perlakuan Jakarta terhadap Aceh seperti itu membuat bangsa Aceh tidak dapat menahan emosi. Dan atas desakan rekan-rekan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh terpaksa mematangkan suasana untuk menuju sebuah pemberontakan. Perkara ini terlihat ketika beliau memimpin Kongres Alim Ulama seluruh Indonesia yang berlangsung pada 11-15 April 1953 di Medan, dan Kongres untuk menilai hasil Kongres Medan yang berlangsung pada 25 - 29 April 1953 di Langsa.²¹

Setelah dua Kongres ini selesai, Teungku Muhammad dawud Beureu-éh yang biasanya didampingi Tgk. Ismail Yakub dan orang-orang PUSA mengadakan tour (perjalanan) berdakwah keliling Aceh dalam rangka pematangan keadaan dan memberikan pengertian tentang negara Islam sebagai langkah awal menuju sebuah pemberontakan.²² Ternyata usaha ini mendapat sambutan yang cukup serius dan meyakinkan dari masyarakat awam. Sumber-sumber kekuatan lama yang nampak kurang bergerak, seperti Pemuda PUSA dan PUSA sendiri kembali diaktifkan. Organisasi-organisasi massa lainnya seperti Persatuan Bekas Pejuang Islam, Pandu Aceh dan Pandu Islam pun mulai diwujudkan dengan mengangkat A. G. Mutiara sebagai pemimpinnya.²³

21 P. Van Dijk, *Op Cit*, hlm. 284. Untuk lebih sempurna dan akurat tentang DI/TII silakan baca M. Nur El Ibrahimy, "Tanggapan terhadap buku Drs. Cornelis Van Dijk: *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*" Bahagian I & II, *Waspada* 1 & 2 Desember 1983.

22 Dr. A.J. Piekar, *Aceh dan peperangan dengan Jepang*, Terjemahan Aboe Bakar, buku I, Banda Aceh, PDIA, 1989, hlm. 31.

23 Ibrahimy, *Tanggapan*, *Ibid*.

Demikian gambaran dan huraian tentang latar belakang lahirnya gerakan DI/TII di Aceh yang dipandu dan dipimpin langsung oleh ulama kharismatik dan pemimpin besar Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh. DI/TII lahir disertai oleh harapan, tantangan, kekecewaan, dan kecemasan yang mendalam. Kenapa tidak, melihat latar belakang lahirnya DI/TII Aceh dengan latar belakang sebelas poin di atas menjadi sesuatu yang amat luar biasa terjadi di Aceh dan untuk Aceh terutama sekali oleh Indonesia dan oleh para penguasa Indonesia yang menjauh dari Islam dan syari'at Islam.

1. Ingkar janji presiden Soekarno terhadap Aceh

Sepenggal kisah yang terjadi berkaitan dengan ingkar janji presiden Soekarno dengan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh yang sudah banyak ditulis para pakar sejarah Aceh di berbagai buku sejarah menjadi inspirasi sangat penting bagi eksistensi Aceh hari ini. Ingkar janji seorang presiden yang sebenarnya tidak perlu terjadi sudah terlanjur terjadi, efeknya menjadi persoalan paling menyulitkan bagi sang presiden sendiri yaitu munculnya gerakan perlawanan bersenjata terhadap presiden secara khusus dan negara secara umum. Perlawanan tersebut kemudian dikenal orang banyak bernama Gerakan DI/TII di Aceh.

Tiga tahun pasca kemerdekaan Indonesia, Presiden pertama Soekarno sudah menyatakan dan memberikan peluang pemberlakuan syariat Islam untuk Aceh. Ketika ia tiba di lapangan terbang Lhoknga Aceh Besar tanggal 16 Juni 1948, pada petang harinya ia berdiskusi dan berpidato di Pendopo Gubernur Aceh di Banda Aceh. Esoknya 17 Juni

1948 Soekarno berpidato di Lapangan Blang Padang Banda Aceh dan tanggal 18 Juni ia berpidato di Bireuen. Menurut Amran Zamzami sebagaimana dikutip Alyasa' Abubakar; pada kesempatan tersebutlah Soekarno menyatakan di depan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo pada waktu itu di hotel Aceh; "biarkanlah rakyat Aceh mengatur wilayahnya sendiri dengan berlaku syariat Islam".²⁴

Sebetulnya, masa kunjungannya ke Aceh pada tahun 1948 Soekarno telah memberi harapan bagi perjuangan ummat Islam Indonesia umumnya dan ummat Islam Aceh khususnya. Dalam kunjungan tersebut telah terjadi suatu dialog antara dia sebagai presiden Indonesia dengan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh sebagai ulama dan pemimpin Aceh. Penggalan percakapan antara presiden Soekarno dengan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh berkaitan dengan implementasi syari'at Islam di Aceh dan inkar janji presiden terhadap Aceh adalah sebagai berikut:

Soekarno : "Saya minta bantuan kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita isytiharkan pada 17 Agustus 1945".

Tgk.MDB : "Saudara Presiden! Kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan

24 Fairus M.Nur (ed), *syariat di wilayah syariat*, Banda Aceh: Dinas syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2002, hlm. 27. Wawancara dengan Abdurrahman Kaoi. 69 tahun. Banda Aceh. wakil ketua MAA Aceh. 23 Maret 2018.

saudara asal sahaja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau *jihad fisabilillah*. Perang untuk menegakkan agama Allah sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang tersebut bererti mati syahid.”

Soekarno : “Kakak!, Memang yang saya maksudkan adalah perang seperti yang telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tgk. Tjihik di Tiro dan lain-lain yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan merdeka atau syahid.”

Tgk.MDB : “Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu saudara Presiden. Dengan demikian bolehlah saya mohon kepada saudara Presiden, bahwa apabila perang telah selesai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syari’at Islam di dalam daerahnya (Aceh).”

Soekarno : “Mengenai hal itu kakak tidak usah khawatir. Sebab 90 % rakyat Indonesia beragama Islam.”

Tgk.MDB : “Ma’afkan saya saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan, bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari saudara Presiden.”

Soekarno: “Kalau demikian baiklah saya setuju permintaan kakak itu.”

Tgk.MDB: “Alhamdulillah. Atas nama rakyat Aceh

saya mengucapkan terimakasih banyak atas kebaikan hati saudara Presiden. Kami mohon, (sambil menyedorkan secarik kertas kepada Presiden) sudi kiranya saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini.”

Ketikam mendengar ucapan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh setegas itu, langsung saja Presiden Soekarno menangis terisak-isak dan tersedu-sedu. Air mata yang mengalir di pipi kiri kanannya telah membasahi bajunya, dalam keadaan seperti itulah dia berkata: “Kakak!, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi Presiden. Apa gunanya menjadi presiden kalau tidak dipercaya. Mendengar ucapan seperti itu Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh langsung menjawab; “Bukan kami tidak percaya saudara Presiden. Akan tetapi hanya sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang.”

Lantas Soekarno sambil menyapu air matanya berkata: “*Wallah, Ballah*, kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syari’at Islam.” Dan *Wallah* saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh nanti benar-benar dapat melaksanakan syari’at Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga? Tanya Soekarno. Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh menjawab: “Saya tidak ragu lagi saudara Presiden sekali lagi atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati saudara Presiden.” Lalu dialog berakhir sampai di situ. Cerita Muhammad Nur El Ibrahimy sebagai mantan sekretaris PUSA dan mantan anggota DPR RI fraksi

Masyumi, karena hiba hatinya melihat Soekarno menangis terisak-isak dengan sumpahnya, beliau tidak sampai hati lagi meminta jaminan hitam di atas putih secara bertulis terhadap janji-janji Soekarno tersebut.²⁵

Allah telah menggambarkan ciri-ciri dan perbuatan sebahagian hambaNya dalam Al-Qur'an al-Karim, antaranya adalah; *Dan diantara manusia ada yang berkata: "Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat", padahal mereka sebenarnya tidak beriman.(Al-Baqarah; 8). Dalam ayat lain: Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: "Kami telah beriman", dan manakala mereka kembali kepada Syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula: "sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok (akan orang-orang yang beriman)". .(Al-Baqarah; 14)*

*"Dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati (mendengarnya), dan ia (bersumpah dengan mengatakan bahwa) Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal ia adalah orang yang sangat-sangat keras permusuhanNya (kepadamu)". (Al-Baqarah; 204). Rasulullah S.A.W. menegaskan bahwa tanda-tanda orang munafik ada tiga jenis sebagaimana sabdaNya. Maknanya: Tanda-tanda seorang munafik ada tiga: **pertama**; apabila ia berkata selalu berdusta, **kedua**; apabila ia berjanji selalu mengingkarinya, **ketiga**; apabila kita memberikan sesuatu amanah ia tidak menyampaikannya.²⁶*

25 Wawancara dengan M. Nur El Ibrahimy, Jakarta pada 30 Agustus 1997. Lihat juga M. Nur El Ibrahimy, *Op Cit*, hal. 67-68.

26 Muhammad Mukhsin Khan (t.t.), *Sahih Bukhari (Arabic English)*, vol.1, Madinah, Dar Ahya Us-Sunnah al-Nabawiya, Kitab Iman, hadis no. 32. hal. 31.

Penggalan-penggalan dialog dan kutipan-kutipan yang kita paparkan di atas sudah menjadi bukti betapa Indonesia melalui presidennya telah menipu bangsa Islam di Aceh dengan tipuan sangat bersahaja. Oleh karenanya, ketika anak keturunan Aceh mengetahui prihal penipuan Indonesia tersebut terhadap Aceh boleh jadi mereka akan bangkit semangat jihadnya untuk menebus penipuan yang sangat bersahaja tersebut. Bagi Aceh yang komunitasnya mendekati 100% muslim, rugi memiliki presiden pertama di Indonesia bernama Soekarno. Tetapi bagi umat beragama lain dan mereka yang tidak beragama sangat beruntung dengan eksistensi seorang presiden Indonesia bernama Soekarno.

2. Diskriminasi dan hadu domba RI terhadap Aceh

Pemerintah pusat di Jakarta sangat takut kepada Aceh yang di masa itu berada di bawah pimpinan para ulama PUSA yang terkenal dekat dengan Islam dan mendapat dukungan penuh dari rakyat Aceh. Hal ini dikhawatirkan akan muncul kekuatan Islam yang dapat mempengaruhi pemerintah pusat selain mengganggu kestabilan politik sekuler mereka yang sedang berkuasa di Jakarta. Untuk menghindari kemajuan Aceh dalam bidang Islam seperti ini, mereka menekan dan mengacaukan Aceh di bawah pimpinan para ulama PUSA dengan berbagai cara termasuk diskriminasi berkelanjutan yang sengaja diciptakan Indonesia di ibukota Jakarta.

Dalam bidang pemerintahan Aceh didiskriminasikan Indonesia dengan cara memindahkan putera-putera terbaik Aceh ke luar Aceh. Pada akhir bulan April 1951, Menteri

Dalam Negeri Kabinet Sukiman; Iskak Tjokroadisurjo dari PNI., mengambil ketegasan terhadap Aceh yang tidak dilakukan oleh pendahulunya. Dalam keputusannya 2 Februari 1952 dia memindahkan dua orang pimpinan Aceh ke Sumatera Timur dan Tapanuli dengan memasukkan lima orang bukan Aceh untuk memimpin sejumlah kantor Bupati di bumi Aceh. Suatu aksi yang cukup sakit dan memalukan, pada bulan Maret 1952 Iskak memberhentikan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh sebagai Gubernur dan ditempatkan pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Sehingga bulan April 1952, dari berbagai jabatan teknis seperti pekerjaan umum, listrik, pertanian, kehewan, kehutanan, kereta api dan industri, hanya Dinas Industri saja yang dikepalai orang Aceh, selainnya berada di tangan orang Jawa dan Batak yang sebahagian mereka beragama Kristen.²⁷

Diskriminasi terhadap Aceh terus meningkat ketika pergantian besar-besaran terhadap jaringan polisi dilakukan. Kepala Polisi Aceh Muhammad Insja dan Komisaris Muda Polisi, Yusuf Affendi, dua tokoh yang dianggap pengikut politik Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dipindahkan ke Medan. Pasukan Mobrig yang cukup berpengaruh dan kuat dari putra-putra Aceh juga dipindahkan ke Sumatera Utara. Pamongpraja dan kepala-kepala kantor mengalami nasib serupa.²⁸

Terkait dengan posisi tentera terjadi pembubaran terhadap Divisi X dalam tahun 1951 yang mayoritas anggotanya putra-putra Aceh. Kemudian posisi devisi X dijadikan sebuah resimen yang dipimpin oleh Mayor

27 Nazaruddin Sjamsuddin, *Op Cit*, hal. 56.

28 M. Nur El Ibrahimy, *Op Cit*, hal. 65-66.

Nazir yang berhaluan kiri dan pernah ditahan rumah oleh Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh pada 12 Juli 1948. Dengan kejadian semacam itu membuat putera-putera Aceh kehilangan pekerjaan yang telah lama diceburi sehingga negara merdeka.

Resimen inipun dipecahkan lagi kedalam beberapa batalyon, sejumlah batalyon dipindahkan keluar Aceh dengan mendatangkan batalyon-batalyon lain ke Aceh, demikian juga anggota-anggotanya ditukar dan dicampur antara orang Aceh dengan orang luar yang kebanyakan non Muslim. Pimpinannya sendiri, Mayor Nazir pada tahun 1965 pernah berontak di Medan mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI).²⁹ Begitulah perilaku pihak Indonesia mengutak atik eksistensi militer di Aceh tatkala itu.

Diskriminasi terhadap putera-putera Aceh yang menguasai TNI, pemerintah Indonesia mengirim unit-unit Tentera Aceh ke luar Aceh dan menggantikannya dengan unit-unit bukan Aceh. Pada bulan November 1950. Batalyon 110 di bawah pimpinan Kapten Hasan Saleh dikirim ke Sulawesi Selatan untuk bergabung dalam operasi penumpasan gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar. Batalyon yang dipimpin Kapten Alamsyah dipindahkan ke Maluku, dan kemudian diberangkatkan batalyon pimpinan Kapten Abdul Manaf ke Maluku pada pertengahan tahun 1951 yang membuat Maluku diduduki oleh dua batalyon dari Aceh.

Pada pertengahan Januari 1951, satu brigade lengkap

29 M. Nur El Ibrahimy, *Ibid*, hal. 66.

yang terdiri dari dua batalyon di bawah pimpinan Mayor Hasballah Haji dihijrahkan dari Kutaraja menuju Tapanuli yang kemudian diikuti oleh pengiriman Kompi 5136 Brimob ke pulau Jawa. Untuk menggantikan kekosongan ini, didatangkan sejumlah pasukan tentera dari Tapanuli yang mayoritas non Muslim. Pemindahan Mayor Hasballah Haji dilakukan dua minggu setelah Konferensi PUSA yang kedua di Kutaraja, yaitu setelah pengabdiannya nampak dengan jelas mendukung PUSA yang sedang dibenci pemerintah pusat di Jakarta. Pada akhir tahun 1950 Aceh hanya memiliki satu Brigade kecil, yaitu Brigade AA yang berada di bawah TT-I (Tentera dan Territorium I) yang bermarkas di Medan.³⁰

Razia terhadap para tokoh PUSA dilakukan oleh Mayor Nazir sebagai komandan operasi dan sebagai orang Komunis bulan Agustus 1951 di Aceh dengan dalih mencari sisa-sisa senjata yang disimpan rakyat dari kaum Komunis. Semua orang PUSA baik yang punya jabatan atau tidak menjadi sasaran razia tersebut termasuklah terhadap para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan kaum ulama. Razia tersebut dilakukan Nazir sebagai balas dendam terhadap ummat Islam yang membenci ideologi komunis manakala ia sedang punya peluang untuk itu. Khusus untuk razia di Aceh Nazir menggunakan sisa-sisa feodal untuk memudahkan pelaksanaannya.³¹

Tujuan utama Razia Agustus 1951 yang diperintahkan Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman dari Partai MASYUMI. dengan sasaran dan targetnya adalah orang-orang Komunis. Usaha ini berhasil dilakukan untuk

30 Nazaruddin Sjamsuddin, *Op Cit*, hal. 57.

31 M. Nur El Ibrahimy, *Op Cit*, hal.72.

daerah-daerah lain di Indonesia sesuai rancangan untuk mencari senjata yang disembunyikan rakyat dari kaum Komunis. Akan tetapi di Aceh, sasarannya malah diputar dan diarahkan kepada bekas-bekas pejuang kemerdekaan yang kebanyakan mereka adalah para ulama. Operasi ini dilakukan dengan cara yang sangat kasar dan biadap, mungkin karena komandannya orang komunis sendiri yang sempat lolos sementara waktu dan sempat menjadi komandan Tentera.³²Sudah kita pahami bahwa perilaku orang-orang Komunis sangat kasar terhadap Islam dan umat Islam sebagaimana yang terjadi di beberapa negara dahulu dan sekarang seperti kasus PKI Muso tahun 1948 di Madiun, kasus PKI pimpinan Aidit di Jakarta tahun 1965 yang membantai sejumlah umat Islam dan para ulama. Demikian juga yang sedang terjadi terhadap umat Islam Uighur dan Turkistan di negara Tiongkok/Cina hari ini.

Razia dan penggeledahan di Aceh sangat berbeda walaupun diadakannya dalam masa yang hampir bersamaan dengan tempat lain, sebab razia ini jelas menjadi arena balas dendam dari kekuatan kiri terhadap orang-orang PUSA. Sebagai orang kiri, Nazir selaku komandan Tentera setempat memandang rangkaian razia ini sebagai kesempatan baik untuk melakukan balas dendam terhadap pemimpin-pemimpin PUSA atas sikap anti Komunis mereka pada masa revolusi.

Kepentingan politik Nazir sendiri sama dengan penasehat politiknya, Tarmuli; dan dalam kenyataannya memang Tarmulilah yang bertanggung jawab atas penggeledahan tersebut. Tarmuli dikirim ke Kutaraja sebagai penasehat politik pada Brigade AA, sesudah

32 *Ibid.*

sikap anti PUSA nya mendapat dukungan Panglima TT-I yang baru, Kolonel Maludin Simbolon, ia ditempatkan pada bahagian keamanan di bawah pimpinan Kapten Leiko Silangit, seorang Batak Toba. Kemudian Tarmuli menetapkan sasaran razianya untuk pemimpin-pemimpin PUSA.³³

Beberapa surat kabar tempatan melaporkan ada tiga orang yang ditangkap karena memiliki senjata di rumahnya. Salah satunya adalah Tgk. Daud Tangsé seorang tokoh Pemuda PUSA dan bekas Komandan Pasukan Rakyat yang menyerang Ulèèbalang di Kabupaten Pidie pada tahun 1946. Hingga akhir November 1951 diperkirakan ada enam belas orang PUSA yang ditahan di seluruh Aceh yang kebanyakannya kemudian dipenjara di Medan, di antaranya adalah; Sjech Marhaban, Wedana Kutaraja, Husin Sab dan Peutua Husin, keduanya terlibat dalam kampanye anti Ulèèbalang di Kabupaten Pidie pada tahun 1946, dan Tgk. Itam Peureulak, seorang ulama dan Majelis Penimbang Kabupaten Pidie.

Perlu dicatat di sini adalah gerakan razia ini dilakukan oleh tentera-tentera non Aceh dan sedikitnya dibantu oleh sisa-sisa feodal, di Kabupaten pidie yang paling aktif adalah Tjut Hamidah. Mereka berusaha menunjukkan tempat-tempat penyimpanan senjata dan rumah-rumah tokoh PUSA yang dicurigai. Ini bermakna sama-sama ingin membalas dendam terhadap PUSA, yang satu datangnya dari arah komunis yang berlainan ideologi dan yang lainnya dari pihak Ulèèbalang (sisa-sisa feodal) yang berbeda kepentingan hidup dan menjadi musuh mereka sejak dahulu. Begitulah caranya orang-

33 Nazaruddin Sjamsuddin, *Op Cit*, hal 65.

orang Komunis menjalankan ajaran Komunisnya, sedikit ada kuasa semuanya digunakan untuk kemajuan ideologi Komunisnya.

Kondisi semacam ini jauh berbeda dengan perilaku dan sikap ummat Islam yang ketika punya kuasa bukan sekedar tidak membantu Islam melainkan menghancurkan Islam seperti perilaku sejumlah presiden Indonesia masa lampau. Demikian juga dengan pemimpin-pemimpin negara-negara mayoritas muslim di dunia seperti Saudi Arabia, Iraq, Suria, Pakistan, Afghanistan, dan lainnya. Mereka lebih mengutamakan jabatan yang sifatnya sangat temporer dibandingkan ideologi Islam yang fundamental dan kekal.

Kemarahan rakyat semakin memuncak ketika kedua rumah Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh sebagai pimpinan PUSA digeledah pihak tentera, yaitu rumah di Beureu-éh dan rumah di Kutaraja. Dalam razia yang dipimpin langsung oleh Tarmuli di Kutaraja, tentera mengepung rumah tersebut semalam penuh dan baru esok paginya digeledah sambil meneriakkan kata-kata kotor: "Kepala pembunuh dan Perampok" kepada Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh. Sementara rumahnya digeledah, beliau diusir kebelakang rumah dan beberapa tentera mengancam akan menembaknya. Namun ancaman tersebut tidak dijalankan karena dikhawatirkan akan terlalu provokatif terhadap PUSA. Selain itu tentera juga mengeledah rumah kediaman Tgk. Ahmad Hasballah Indrapuri.³⁴Tgk. Ahmad Hasballah Indrapuri merupakan seorang ulama beken penasehat PUSA yang berasal dari

34 Nazaruddin Sjamsuddin, *Op Cit*, hal. 65-66, M. Nur El Ibrahimy, *Op Cit*, hal. 73.

Indrapuri kabupaten Aceh Besar.

Program lain dari Jakarta untuk menghancurkan Aceh ialah memindahkan sejumlah kakitangan penting dari Aceh dan menggantikannya dengan orang-orang Jawa yang didatangkan dari berbagai daerah lain. Kebanyakan mereka adalah non muslim, dan walaupun yang muslim tetapi aktivitas hariannya berlawanan dengan anjuran Islam. Mereka mulai menghidupkan judi, minum arak dan berzina secara terang-terangan, selain itu juga membuka pasar malam untuk berbagai kegiatan maksiatnya. Semua itu bagi orang Aceh yang terkenal kuat beragama Islam menjadi ancaman besar dalam kehidupannya, apalagi dahulu berjuang membebaskan negara ada satu harapan agar syari'at Islam berjalan penuh di tanah air ini. Akan tetapi sebaliknya yang terjadi, mereka dibawa ke zaman biadab kembali oleh orang-orang yang tidak begitu dikenali dari daerah yang serba berbeda dengan Aceh.

Yang paling menyakitkan hati para ulama lagi adalah ada di antara mereka yang dengan sengaja membuka praktik pelacuran di Kutaraja dengan menghadirkan tidak kurang dari lima puluh perempuan jalanan dari Sumatera Timur untuk ditempatkan di sana. Yang paling mengejutkan masyarakat adalah berkembangnya suatu berita skandal seks yang melibatkan orang penting dalam pemerintah di Aceh yang bukan orang Aceh. Setelah menerima protes-protes hebat dari masyarakat, pemerintah pusat di Jakarta segera memindahkan mereka keluar Aceh dan menggantikan dengan orang PUSA.³⁵ Selain itu, cara berpakaian anak isteri merekapun yang mendedahkan aurat dan pergaulan bebas mereka nampak dengan jelas

35 Nazaruddin Sjamsuddin, *Op Cit*, hal. 69-70.

ada suatu misi untuk menghancurkan akhlak cucu Iskandar Muda di Tanah Rencong Serambi Makkah ini.

Pembatasan pengiriman jama'ah haji asal Aceh yang digabungkan dengan Sumatera Utara menjadi isu baru pula bagi masyarakat yang seratus persen Muslim itu. Pada tahun 1951 Kementerian Agama meluluskan 400 orang jama'ah untuk berangkat ke tanah suci, 100 orang untuk Aceh, 100 untuk Sumatera Timur dan 200 untuk Tapanuli yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Ketidakpuasan ini tidak saja berpunca pada fakta bahwa kuota Aceh telah dipotong menjadi setengah dari jumlah calon haji yang berangkat pada tahun sebelumnya, tetapi karena Jakarta memberi banyak kesempatan untuk Tapanuli. Unsur diskriminasi nampak dengan jelas bahwa jumlah orang Islam di Tapanuli jauh lebih kecil dibandingkan dengan Aceh.

Di bidang pendidikan umpamanya, unsur diskriminasi lebih nyata lagi dari pembahagian sekolah-sekolah. Dari dua puluh delapan (28) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang terdapat di Sumatera Utara, tiga belas diantaranya ada di Tapanuli, sembilan di Sumatera Timur dan enam sisanya terdapat di Aceh. Dari tiga belas SMP yang ada di Tapanuli, lapan berada di Tapanuli Utara yang mayoritas Kristen, ini berarti lebih banyak daripada yang terdapat di Aceh yang lebih besar wilayahnya dan lebih banyak penduduknya, lebih kurang dua kali lipat dari penduduk Tapanuli Utara. Situasi serupa juga terdapat dalam bidang kesehatan, pada tahun 1950 sebelum Aceh dimasukkan ke dalam Propinsi Sumatera Utara, Aceh dan Tapanuli masing-masing memiliki enam orang dokter,

tetapi dua tahun kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengirimkan sembilan orang dokter asing ke Tapanuli, dan hanya lima (empat di antaranya orang asing) ke Aceh.³⁶

Diskriminasi dalam bidang pendidikan itu semakin memuncak ketika pemerintah pusat menutup satu-satunya Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kutaraja pada pertengahan tahun 1951. Dan mengizinkan beberapa orang siswa sahaja untuk melanjutkan pendidikannya ke Medan dan Yogyakarta.³⁷ Ini merupakan suatu hal yang sangat tidak sebanding dengan keadaan pendidikan untuk daerah lain yang memiliki sekolah sendiri. Kondisi ini nampaknya sengaja diciptakan untuk melahirkan manusia-manusia Aceh yang sekuler. Rencana ini semakin nampak ketika pemerintah pusat dengan sengaja menepis pendidikan agama yang didirikan PUSA dengan membangun sekolah-sekolah umum disebelahnya dalam bentuk bangunan dan peralatan serta tenaga pengajar yang sangat memadai. Untuk sekolah agama bukan hanya dihentikan bantuan dana, bahkan fasilitas yang telah diberikan dahulu ditarik kembali. Sebagai akibat daripada itu banyak orang tua menghantar anaknya ke sekolah umum dengan meninggalkan sekolah agama yang dari dahulu mereka ikuti. Akibatnya lahirlah para sarjana muslim yang berpikiran sekuler di Aceh hari ini sebagai buah dari bibit yang disemai mereka dahulu.

Perasaan diskriminasi rakyat Aceh oleh pemerintah pusat semakin mencapai puncak ketika peralatan pengembangan ekonomi rakyat secara nyata diabaikan.

36 *Ibid*, hal. 71-72.

37 *Ibid*, hal. 72.

Irigasi (saluran air) yang di masa penjajahan Belanda demikian lancar pengairannya kembali hancur di zaman kemerdekaan yang negara sudah dipimpin oleh bangsa sendiri. Jalan-jalan utama untuk berbagai pengangkutan rusak total.³⁸ Rel kereta api malah sengaja dibongkar dan anak-anak yang lahir selepas tahun enam puluhan nyaris tidak mengenal kereta api. Untuk menutupi kelemahannya, pemerintah pusat selalu meyakinkan rakyat dengan perkataan-perkataan manis bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah dana untuk itu. Keadaan ini dilanjutkan dengan peninjauan demi peninjauan, janji demi janji, namun tidak satupun yang ditepati.

Apa maknanya keadaan seperti itu bagi rakyat Aceh apabila dikaitkan dengan pepatah populernya: "*Pang Ulèè Buet Nakeuh shalat, Pang Ulèè Hareukat Nakeuh Meugoe*" (pokok pangkal pekerjaan adalah shalat, pokok pangkal harkat adalah bertani). *Buya Krueng Teudong-dong Buya Tamöng Meuraseuki* (Buaya Sungai Tercengang-cengang Buaya datang Dapat Rezeki).

Pepatah Aceh tersebut menggambarkan bahwa kehidupan bangsa Aceh tidak boleh lepas dengan ibadah terutama shalat sebagai lambang penghambaan diri kepada Allah SWT. (*Pang ulee buet nakeuh shalat*). Dan bangsa Aceh selalu mencari rizki yang halal dan *thaiyyiba* dengan selalu menunaikan kewajiban agama seperti jauh dari riba, jauh dari gharar, tidak mencuri, merampok, mencopet, menipu, dan seumpamanya. Mereka selalu membayar zakat, berinfaq, bersedekah dan seumpamanya dari hasil rizki yang diperoleh dengan cara dan jalan yang halal dan *thaiyyiba* tersebut (*Pang uleei Hareukat nakeuh Meugoe*).

38 *Ibid*, hal. 75.

Di Aceh memang berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Sumatera, di mana sawah didapati lebih luas daripada ladang dan kolam ikan. Tempat-tempat ini telah berkembang dengan pesat di masa penjajahan Belanda, demikian juga produk padinya. Pada tahun 1937, dengan sawah seluas 140,000 hektar dan ladang 6000 hektar, Aceh mempunyai penghasilan 2000 ton beras dari produk total sebesar 216.000 ton. Karena besarnya peningkatan sawah yang punya saluran air di Aceh Utara dan Timur setelah tiga tahun kemudian, penghasilan ini naik mencapai 24.000 ton, dan pada tahun 1941 menjadi lebih tinggi lagi sehingga 36.000 ton. Peningkatan produk beras ini terputus ketika kedatangan Jepang dan pecahnya revolusi nasional karena banyak sawah dan irigasi terbengkalai. Pengabaian yang berlangsung terus dalam tahun 1951-1952 mengakibatkan hilangnya produk sehingga empat puluh persen dan pada tahun 1952 rakyat Aceh hanya sanggup mengirimkan beras ke Sumatera Timur tidak lebih dari 10.000 ton.³⁹

Penghentian sistem barter pada bulan Februari 1952 dan memindahkan operasi *import-export* dari beberapa pelabuhan di pesisir Aceh ke Sumatera Utara, membuat hati orang Aceh semakin pedih, ini berarti kehilangan peluang berniaga besar bagi masyarakat yang mendiami hujung barat nusantara itu. Akibat daripada perpindahan sejumlah pegawaipemerintah dari Aceh membuat orang Aceh semakin sulit memperoleh surat izin perdagangan, ini dikarenakan hampir tidak ada bangsa Aceh yang memegang posisi penting pada pejabat-pejabat tersebut.⁴⁰

Pengaruh penghapusan barter tidak hanya kepada

39 *Ibid*, hal. 75-76.

40 *Ibid*, hal. 77 & 79.

para petani dan pedagang saja, akan tetapi mengakibatkan kehidupan buruh-buruh pelabuhan pun semakin terancam. Hal ini bukan hanya dipengaruhi oleh kesempatan kerja saja, tetapi juga mengurangi pendapatan masyarakat secara luas. Umpamanya sebanyak empat ratus buruh menganggur di pelabuhan Kuala Langsa, sebab sekarang pelabuhan tersebut hanya sanggup menampung pekerja lima puluh orang saja dengan pendapat rata-rata sebulan lebih kurang sama dengan dua hari kerja pada masa berlakunya barter.⁴¹

Semua diskriminasi tersebut merupakan rentetan daripada pembubaran sebuah propinsi Aceh dan bergabung dalam propinsi Sumatera Utara pada 14 Agustus 1950. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no 5 tahun 1950. Akting Presiden Republik Indonesia Mr. Assaat, membubarkan Propinsi Aceh yang baru berusia delapan bulan, suatu keputusan yang sangat menyakitkan bagi Aceh. Sebagai akibat dari itu, hubungan dengan pusat semakin renggang dan situasi politik di Aceh bertambah panas.⁴²

Diskriminasi Indonesia terhadap Aceh era lima puluhan menimbulkan perlawanan rakyat Aceh terhadap Indonesia dengan gerakan DI/TII yang dipimpin oleh pemimpin besar dan ulama kharismatik Aceh Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh. Diskriminasi Indonesia terhadap Aceh dalam era tahun tujuh puluhan menimbulkan gejolak perlawanan Aceh terhadap Indonesia melalui wadah Aceh Merdeka (AM) yang kemudian berubah nama menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pimpinan

41 *Ibid*, hal. 80.

42 Prof. A. Hasjmy at al, *Op Cit*, hal. 134.

Hasan Muhammad Tiro. Kita belum tau lagi diskriminasi Indonesia terhadap Aceh pada masa dua ribuan bakal memunculkan pergolakan apa di Aceh terhadap Indonesia.

3. Tidak menghargai jasa pertahanan Aceh terhadap kemerdekaan RI

Indonesia secara normal tidak menghargai jasa Aceh terhadap kemerdekaannya yang dipertahankan oleh bangsa Islam Aceh khususnya dalam masa invasi Belanda kedua tahun 1948. Pada masa itu Indonesia secara defacto sudah tiada dalam peta dunia karena presiden dan wakil presiden sudah ditangkap Belanda, ibu kota Jakarta sudah dijarah Belanda, ketika ibu kota dipindah ke Jogjakarta iapun dikuasai Belanda,⁴³ maka jadilah wilayah yang diberi nama Indonesia tanpa pemimpin dan tanpa ibu kota, pemimpin dan ibu kota itu menjadi lambang eksistensi sebuah negara, manakala keduanya sudah tiada maka eksistensi negara juga bisa tiada. Begitulah kondisi Indonesia pada waktu itu yang hanya tinggal namanya saja tanpa kedaulatan, tanpa kekuasaan, dan tanpa wilayah sah untuk dimiliki.

Dalam kondisi seperti itu, Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di kampung halamannya di Bukit Tinggi Sumatera Barat dinobatkan menjadi Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Muhammad Hatta secara implisit. Ternyata Bukit Tinggi pun dijarah oleh Belanda sehingga Syafruddin Prawiranegara bersama dengan perangkat negara lainnya seperti markas besar TNI, Polri, Kehakiman, Kejaksaan hijrah ke Kutaraja (sekarang

43 George Mc Turnan Kahin dkk, *Syafruddin Prawiranegara Penyelamat Republik*, Jakarta: Yayasan Asrama dan Pendidikan Islam bekerjasama dengan Panitia Peringatan Satu Abad Mr. Syafruddin Prawiranegara (1911-2011), 2011, hlm. 3.

Banda Aceh).⁴⁴Di Kutarajalah mereka ditampung dan diberi berbagai fasilitas hidup oleh bangsa Islam Aceh, sementara pihak mujahidin dan mujahidah Aceh terus berjuang mempertahankan Republik Indonesia di front Medan Area memerangi Belanda agar tidak tembus masuk ke Aceh.

Selebihnya Aceh juga membiayai penuh Haji Agussalim sebagai duta keliling Indonesia di luar negara, membiayai penuh biaya hidup L. N. palar sebagai duta Indonesia di India. Semua keperluan hidup mereka dikirim oleh masyarakat Aceh dari hasil usaha orang Aceh. Kolonel Husin Yusuf yang pernah diturunkan pangkatnya oleh pimpinan militer Indonesia merancang dan menderek antena radio yang kemudian terkenal dengan nama Radio Rimba Raya di Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Radio inilah yang mengudara menginformasikan bahwa bangsa Islam Aceh gigih mempertahankan Islam dan negara di front Medan Area, siaran tersebut diterima oleh radio India di New Delhi lalu disebarakan lagi sehingga diterima oleh siaran radio PBB. Inilah dasar PBB mengklaim bahwa Indonesia masih wujud dan tidak dikuasai penuh oleh penjajah Belanda.⁴⁵Sebagai kesimpulannya adalah; Indonesia wujud dalam peta dunia berdasarkan perjuangan dan pertahanan bangsa Islam Aceh dengan berbagai bantuan, distribusi dan kontribusi yang diberikan oleh bangsa Aceh untuk Indonesia yang Islami.

Setelah Indonesia bebas dari jajahan Belanda, satu persatu pemimpinnya menyisihkan dan melupakan

44 O. E. Engelen dkk, *Lahirnya satu bangsa dan negara*, Jakarta: UI Press, 1997, hlm., 285

45 *Ibid*, hlm., 286.

jasa besar Aceh terhadap Indonesia. Itulah namanya Indonesia melalui tangan-tangan dan kepala-kepala para penguasanya tidak menghargai jasa pertahanan Aceh terhadap pembebasan Indonesia dari jajahan Belanda. Aceh tidak menuntut terlalu besar dari Indonesia dan tuntutan Aceh tidak akan menghancurkan Indonesia seperti Aceh meminta diberikan hak untuk menjalankan hukum Islam dalam wilayahnya yang pernah dijanjikan presiden pertama Soekarno, tetapi Soekarno menkhianatinya. Pada zaman Orde Baru pimpinan Soeharto Aceh meminta sedikit bagi hasil dari hasil kekayaan Aceh yang semuanya diangkut ke Jakarta, namun tidak pernah diberikan sehingga ia berakhir jabatannya karena diturunkan rakyat dari kursi kepresidenan dalam gelombang reformasi tahun 1998.

Semua itu menjadi bukti kalau Indonesia garang dan ganas terhadap Aceh padahal Indonesia wujud karena Aceh. Apalagi kalau dikaitkan dengan perilaku jahat dan biadap para TNI secara berstruktur membantai bangsa Aceh ketika Indonesia menangani gerakan DI/TII seperti kasus Pulot, Cot Jeumpa dan Krueng Kala di Aceh Besar yang mematikan 99 orang termasuk anak-anak dan kaum wanita yang tidak bersalah, mereka disuruh berbaris di lapangan kemudian ditembak secara brutal.⁴⁶ Demikian juga dengan kasus brutal TNI terhadap Tgk. Bantaqiyah dan para pengikutnya di Beutong Ateueh yang diberondong sampai mati satu persatu, kasus Simpang KKA yang ditembak secara brutal, kasus gedung KNPI Lhokseumawen yang disiksa secara biadab, kasus Arakundoe yang menenggelamkan manusia Aceh secara hidup-hidup,⁴⁷ dan banyak lagi kasus-kasus

46 M. Nur El Ibrahim, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh*, Jakarta: Gunung Agung, 1986, hlm., 10.

47 *Serambi Indonesia*, 13 Juni 1999. *Utusan Malaysia*, Rabu 5 Mei 1999.

lainnya. Sampai hati Indonesia membantai bangsanya sendiri yang pernah melepaskannya dari ancaman maut.

4. Tidak mengizinkan Aceh berlaku syari'ah

Salah satu penyebab lahirnya gerakan DI/TII dalam tahun 1953 di Aceh adalah efek daripada brutalnya presiden Soekarno terhadap pengangkangan pemberlakuan syari'at Islam di Aceh. Kita pahami bersama bahwa masyarakat Aceh pada mulanya hampir seratus persen beragama Islam dan tha'at terhadap ajaran Islam. Ketika Soekarno meminta bantu Aceh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam masa invasi kedua Belanda terhadap Indonesia tahun 1948 melalui pemimpin dan ulama Aceh Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh, Soekarno berjanji akan memberikan pemberlakuan syari'at Islam terhadap Aceh manakala Indonesia bebas dari penjajahan Belanda suatu masa nanti. Ternyata ketika Indonesia bebas dari invasi Belanda tersebut Soekarno bukan hanya tidak mengizinkan Aceh berlaku syari'at Islam melainkan ia menghambat majunya Islam di Indonesia dengan bergabung dan memperkuat Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Untuk pelaksanaan syari'at Islam bagi Aceh sama sekali tidak dihiraukan lagi oleh Soekarno sehingga para pejuang kemerdekaan yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari invasi kedua Belanda tahun 1948 tersebut menjadi sedih, kecewa, marah dan benci terhadap Soekarno, terhadap pemerintah Indonesia, dan

Serambi Indonesia, Isnin 11 Januari 1999. *Utusan Malaysia*, Rabu 28 Juli 1999. *Berita Harian*, Sabtu 31 Juli 1999. *Waspada*, 1 Agustus 1999. *Serambi Indonesia*, 10 Agustus 1999. *Serambi Indonesia*, 11 Agustus 1999.

terhadap Indonesia. Ketika sejumlah masyarakat Aceh bicara pelaksanaan syari'at Islam di Aceh pihak pemerintah Indonesia di Jakarta tidak segan-segan mengkonternya karena haluan kepemimpinan Indonesia memihak kepada ideologo nasionalis komunis. Sehingga berakhir kepemimpinan Soekarno dari jabatan presiden pertama Indonesia berganti dengan presiden kedua Soeharto tahun 1965 pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sebagaimana yang pernah dijanjikan Soekarno melalui Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh untuk Aceh tidak berbenihpun.

Dalam masa kepemimpinan Soeharto tidak pernah terjadi dan tidak pernah dibicarakan tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sehingga berakhir jabatannya dalam tahun 1998. Ide pemberian pemberlakuan syari'at Islam di Aceh muncul setelah tumbanganya Soeharto dari kursi kepemimpinan tahun 1998 dengan pemberian Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Itupun terjadi karena Indonesia sudah sangat susah menghadapi pemberontak-pemberontak dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sudah menguasai wilayah Aceh secara defacto. Jadi faktor pemasangan pemberian syari'at Islam terhadap Aceh menjadi salah satu penyebab muncul marah Aceh sehingga masyarakat Aceh mengisyitiharkan gerakan DI/TII bergerak di Aceh tahun 1953.

5. Mempermainkan pancasila sebagai alat menolak Islam jadi dasar negara.

Sebagaimana telah kita sebutkan di atas bahwa Soekarno mendominasi rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang berkamuflase dengan Islam untuk

meyakinkan mayoritas ummat Islam di Indonesia. Ia sering mengatakan bahwa Pancasila itu milik ummat Islam maka tergantung ummat Islam untuk menggunakannya atau ummat Islam bisa mengisi Pancasila dengan ajaran-ajaran Islam sehingga Indonesia menjadi negara yang bernuansa Islam. Di sisi lain sebagai presiden dia tidak pernah memberikan peluang kepada ummat Islam untuk melakukan apa yang ia katakan tadi, sebagai contoh konkritnya adalah kasus pemasungan pemberlakuan syari'at Islam untuk Aceh, kasus penghapusan tujuh kata pada sila pertama Pancasila, kasus perubahan Piagam Jakarta, dan seterusnya.

Sikap dan prilaku Soekarno tersebut membuat Islam dan ummat Islam rugi, mundur, lemah, amburadul, terpecah, dan kalah dengan ummat Islam lain yang berpaham sekuler dan non muslim di Indonesia. Kalau sikap dan prilaku Soekarno tersebut menjadi amal shalih dan suatu kebajikan di mata Allah, kita berharap dia mendapatkan syurga Allah di hari yang kekal. Tetapi kalau sikap, prilaku, dan upaya pribadinya yang dengan nyata menghambat pelaksanaan dan perkembangan Islam dan ummat Islam di Indonesia, kita tidak tau apa yang sedang terjadi terhadap dirinya di alam baqa. Semoga Allah memberi perlindungan kepadanya.

Sebagai seorang presiden untuk 90 % muslim di negara yang dipimpinnya, semestinya ia wajib menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang berlaku hukum Islam penuh di dalamnya. Ia wajib meletakkan Islam sebagai dasar negara Indonesia dan Al-Qur'an beserta Hadits sebagai dasar hukumnya, bukan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945 yang harus dijadikan dasar negara dan konstitusi negara. Karena pikiran, pemikiran dan sikap dia yang demikian rupa maka sadar atau tidak sadar Indonesia hari ini menjadi negara nasional dalam konstitusi namun menjadi negara sekuler dalam implementasi. Susah untuk dibantah kenyataan ini hanya akibat pikiran, pemikiran dan aksi politik seorang Soekarno Indonesia menjadi seperti ini. Untuk hari ini di mana Indonesia sudah sangat majemuk penghuninya, non muslim sudah menguasai ekonomi, media, politik, dan sebagainya menjadi sangat amat berat untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara milik ummat Islam apalagi memberlakukan hukum Islam, apalagi konstitusi sudah sangat banyak perubahan termasuklah boleh non muslim dan non pribumi menjadi pemimpin yang sebelumnya tidak dibolehkan konstitusi.⁴⁸ Semoga Allah memberikan jalan keluar untuk agamanya dan hambanya yang shalih, bertaqwa, dan beramal shalih.

B. LATAR BELAKANG MUNCULNYA PEMBERONTAKAN GAM

Penyebab meletusnya Gerakan Aceh merdeka (GAM) yang dipimpin dan diproklamkan oleh Dr. Tengku M. Hasan Di Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 di Gunung 'Alimon kawasan kecamatan Tiro kabupaten Pidie provinsi Aceh⁴⁹ adalah; terkait dengan faktor sejarah, faktor eksploitasi hasil alam Aceh oleh pemerintah Indonesia untuk dibawa ke Jakarta, faktor kemiskinan rakyat Aceh yang kaya hasil alamnya, faktor pencurian hasil hutan Aceh

48 Silakan bandingkan UUD 1945 asli pasal 6 dengan hasil amandemen ketiga dalam konstitusi Indonesia.

49 Dr. M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka, Ideologi, Kepemimpinan, dan Gerakan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000, hlm., 26.

oleh pihak-pihak tertentu yang dibenarkan pemerintah Indonesia, faktor perambahan kehormatan ummat Islam Aceh yang dijauhkan dari syari'at Islam.

Kemunculan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh tidak dapat dipisahkan dengan brutalitas pemerintah Indonesia masa Orde Baru (Orba) pimpinan Soeharto di Jakarta. Pada masa itu kekayaan alam Aceh terutama sekali gas alam dan minyak tanah di Aron dekat Lhokseumawe dikuras habis dan dibawa ke Jakarta.⁵⁰ Semenjak gas Aron ditemukan dalam tahun 1970 Aceh tidak diberikan sepersenpun hasil penjualannya untuk membangun Aceh sehingga Aceh terus miskin dan tidak terurus. Jalan-jalan di Aceh berlobang, banyak sungai tidak berjembatan, bangunan sekolah, universitas seperti gubuk tidak ada empunya, kantor-kantor pemerintah seperti tidak terurus, padahal Aceh kaya hasil alamnya namun Aceh miskin dalam segala sektornya.

Ada faktor historis yang sangat mengkristal bagi anak bangsa Islam di Aceh sehingga lahirnya gerakan perlawanan terhadap Indonesia yang kemudian bergelar GAM. Orang-orang Aceh masih sangat terikat dengan sejarah keperkasaan Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam tempo dulu yang pada masanya Aceh berdaulat sampai lebih separuh Pulau Sumatera dan sebahagian semenanjung Malaysia. Sejarah ini terus dikembangkan dalam kehidupan orang Aceh sehingga mereka merasa hidup dalam negeri sendiri bukan negeri orang lain bernama Indonesia. Rentetan itulah bersemi dalam sanubari orang Aceh sehingga begitu Hasan Tiro mengumumkan Gerakan

50 Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Jakarta: Madani Press, 1999, hlm., 141.

Aceh Merdeka disambut serius oleh masyarakat Aceh secara serentak. Ditambah lagi dengan perilaku pemimpin Indonesia yang sangat diskriminatif terhadap Aceh pada waktu itu sehingga banyak orang Aceh yang hidup melarat dan miskin.⁵¹

eksploitasi hasil hutan yang melimpah di Aceh oleh pemerintah pusat sehingga baik pembangunan SDM maupun pembangunan fisik lainnya sama sekali tidak jalan di Aceh menjadi penyebab lain kenapa Aceh harus berontak terhadap Indonesia. Pada masa itu eksploitasi sumber alam Aceh terutama sekali hasil hutan berupa kayu, rotan, hasil tambang nampaknya tidak sesuai dengan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Aceh tempat dimana semua sumber itu dieksploitasi.⁵² Dan masyarakat Aceh melihat dengan mata kepala dan merasakan hati yang pilu hari-hari hasil alam negerinya diangkut dengan truk-truk besar dibawa keluar Aceh. Yang menjadi lebih sedih lagi adalah Aceh memiliki banyak kayu tetapi harga kayu lebih mahal di Aceh ketika masyarakat membelinya untuk keperluan buat rumah dan sejenisnya.

Kemiskinan yang melilit Aceh karena kekayaan alamnya dibawa ke Jakarta menjadi pemicu lain Aceh harus bangkit melawan Indonesia dalam kasus Gerakan

51 Puspha Iyer, *Peace Zone in Aceh: A Prelude to De-Militarisation*. USA: Institute for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University, 2003, hlm., 2. Lihat juga, Puspha Iyer dan Christopher Mitchell (), *The Collepse of Peace Zones in Aceh*. USA: Institute for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University, 2004, hlm., 2-4.

52 *Majalah Tempo*, Jakarta, 13 Agustus 1977. *Harian Waspada*, Medan, 15 Maret 1978, hlm. 4, 6 Februari 1981, hlm. 3.

Aceh Merdeka.⁵³ Bagi rakyat Aceh berontak tidak berontak sama saja tidak ada kesejahteraan hidup di bumi yang banyak hasil miliknya. Maka dari pada hidup putih mata lebih baik mati putih tulang dan berkalang tanah. Dari pada hidup menderita melihat Jakarta dan pulau Jawa yang memiliki jalan mewah, gedung mewah, jembatan mewah super market mewah, transportasi mewah, dan semuanya mewah dengan hasil rampasan dari Aceh maka lebih baik melawan agar para aggressor memikirkan kebenaran dan keadilan.

1. Tidak adilnya Indonesia terhadap Aceh

Ketidakadilan Indonesia terhadap Aceh dari tahun ke tahun tetap saja terjadi dari pihak Republik Indonesia. Mulai dari pelanggaran HAM oleh rezim Indonesia terhadap rakyat Aceh seperti kasus Pulot, Cot Jeumpa, dan Krueng Kala sampai kepada kasus pembuangan manusia hidup kedalam sungai yang terkenal dengan kasus Arakundoe, penyanderaan rakyat dan penganiayaan dalam gedung KNPI Lhokseumawe, kasus penembakan Krueng Tuan, kasus penembakan massal di Simpang KKA, dan sejumlah kasus lainnya yang mematikan sudah berlaku di Aceh sebagaimana yang telah kita bahas di atas tadi. Belum lagi kita bicarakan pelanggaran HAM zaman Darurat Militer yang sangat amat luar biasa yang terjadi tahun 1989 sampai dengan tahun 1998. Dalam masa ini pula terjadi penyiksaan dan pembantaian Rumoh Geudong di Kecamatan Geulumpang Tiga kabupaten Pidie, pembantaian Tgk. Bantaqiyah bersama dengan murid-muridnya di Beutong

53 M. Mas'ud Said, *Psikologi Politik Masyarakat Aceh*. dalam Aceh Merdeka Dalam Perdebatan. Jakarta: P.T. Cita Putra Bangsa, 1999, hlm., 73.

Ateueh, terkuak rahasia Bukit Tengkorak sebagai bukti pembantaian rakyat Aceh oleh TNI, dan sejumlah kasus lainnya.

Semua itu dibiarkan saja oleh pemerintah Indonesia dan tidak pernah tuntas diselesaikan kasusnya walaupun itu semua termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Tetapi kalau seorang anggota TNI yang ditembak oleh GAM maka rumah, kedai, kilang padi, dan apa saja yang ada disekitar lokasi penembakan dibakar semua seperti kasus Juli, kasus Samalanga dan kasus-kasus lainnya. Sungguh Indonesia sangat tidak adil terhadap Aceh dan rakyatnya. Prilaku ini menjadi penyebab Aceh membangkang terhadap Indonesia.

Dalam bidang hasil bumi, puluhan tahun Indonesia menggeruk gas alam di kawasan Aron Lhokseumawe, sepersenpun tidak diberikan kepada Aceh. Prilaku semacam ini bukan sekedar tidak adil Indonesia terhadap Aceh melainkan Indonesia mendhalimi Aceh yang pernah memerdekakan Indonesia. Ini prilaku yang sangat jarang terjadi dalam dunia untuk sebuah negara yang dhalim terhadap bangsanya, tetapi terjadi di Indonesia. Faktor ini menjadi *causa prima* lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Belum lagi kita lihat pengambilan hasil hutan, hasil laut, hasil gunung di Aceh yang dijual keluar negeri oleh cukong-cukong binaan rezim Indonesia pada zaman Orde Baru (Orba). Yang paling disayangkan adalah cukong-cukong tersebut bukan hanya bukan orang Aceh melainkan bukan orang Indonesia dan sebahagiannya bukan orang Islam. Tetapi karena kerabat pemegang kuasa maka

merekalah yang mendominasi bumi dan alam Aceh pada masa itu. Inipun menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kemunculan GAM di Aceh.

Bidang pendidikan sebagaimana telah kita sebutkan di belakang bahwa Aceh mendapatkan kapasitas dan fasilitas paling terbelakang dibandingkan dengan Sumatera Utara tetangganya Aceh, berkenaan dengan pembangunan gedung, penempatan guru dan dosen, peruntukan beasiswa, sangat tidak sebanding. Dalam hal kelanjutan pendidikan peringkat master dan Philosophy Doctor, putera puteri Aceh tertatih-tatih sekolah sendiri dengan biaya sendiri pergi keluar negeri. Tetapi anak-anak dari pulau Jawa dengan penuh semangat bersekolah dengan penuh beasiswa di luar negeri dalam era delapan puluhan.

Dalam bidang kesehatan pula rumah sakit di Aceh baru berkembang setelah mendapatkan bantuan asing pasca tsunami, sebelumnya tersungkur seperti tidak ada empunya. Dokter tidak ditambah, tidak dikemas kini, peralatan tidak dikembangkan, tenaga medis tidak dilatih kemahiran sehingga dari tahun ke tahun kualitas rumah sakit tidak ada perkembangan signifikan samasekali. Belum lagi kita bicara posisi Puskesmas yang sampai hari ini belum merata dokter spesialis berada di sana. Sementara kondisi fasilitas kesehatan di instansi kesehatan di Pulau Jawa luarbiasa lengkap dan sempurna. Tilik punya tilik kesempurnaan tersebut dimodali dengan uang hasil penjualan gas alam dari bumi Aceh. Sebuah keadilan yang tak pernah adil untuk Aceh, dan di sana pula muncul ide memberontak terhadap Indonesia.

2. Rekrutmen Sumber Daya Alam (SDA) Aceh untuk kepentingan RI

Semenjak Indonesia merdeka Aceh tidak pernah melarang Indonesia untuk merekrut hasil alamnya karena Aceh menganggap Indonesia negara miskin yang memerlukan bantuan Aceh. Tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah ketika Aceh diam maka Indonesia menjadi brutal dan thamak terhadap harta Aceh. Itulah yang terjadi di zaman lampau sehingga menimbulkan sikap memberontak dari para pemuda dan tokoh-tokoh Aceh dalam kasus Aceh Merdeka yang kemudian menjadi GAM.

Dalam tahun delapan puluhan, Professor Nazaruddin Syamsuddin putera Aceh kelahiran Bireuen pernah menyatakan yang dimuat dalam majalah Panji Masyarakat bahwa; Aceh menjadi miskin karena kekayaan alamnya total diangkut ke Jakarta. Ketika seorang professor yang berbicara, pihak pemerintah diam seribu bahasa karena benar adanya. Orang Aceh menjadi malu hari ini karena orang Indonesia tidak pernah malu terhadap prilaku pribadinya yang mendhalimi saudara kandungnya, yang mengkhianati para penolongnya. Memang begitulah keadaan yang ada memang sulit untuk dipercaya tetapi itulah adanya.

3. Tidak menghargai Aceh sebagai pendiri dan penyelamat RI

Salah satu sebab munculnya pemberontakan di Aceh adalah karena pihak Indonesia tidak menghargai Aceh sebagai pendiri Republik Indonesia. Ketika para pembesar Indonesia yang datang ke Aceh sering mengangkat issue

pertahanan Aceh terhadap Indonesia, memuji Aceh karena membeli dua pesawat Garuda, menyanjung Aceh karena pertahanan front Medan Area, memuja Aceh karena Radio Rimba Raya, dan menghormati Aceh karena membiayai para duta. Itu sebuah pujian yang menarik didengar telinga, tetapi sesungguhnya orang Aceh tidak menginginkan itu semua sebagai pemanis bibir. Yang diharapkan Aceh adalah bagaimana Aceh memerdekakan Indonesia begitulah Indonesia memerdekakan Aceh dalam makna yang bervariasi. Bagaimana Aceh membiayai Indonesia begitulah Indonesia membiayai Aceh dalam arti pemberian kemudahan hidup. Bagaimana Aceh membebaskan Indonesia dari invasi Belanda begitulah Indonesia harus membebaskan Aceh dari serbuan pihak Jakarta sebagaimana terjadi dalam kasus DI/TII dan GAM., dahulukala. Ungkapan ril yang mesti kita ungkapkan di sini terkait dengan dua pemberontakan adalah; begitu banyaknya jasa baik Aceh untuk Indonesia sehingga Indonesia eksis di muka bumi dan makmur karena Aceh, maka sudah layaklah Indonesia melepaskan Aceh dari aneksasinya, sebagaimana Indonesia melepaskan Timor Timur pada masa presiden B.J. Habibie tahun 1998/1999.

Karena semua itu tidak terjadi, malah yang terjadi sebaliknya, seperti pembantaian, penyiksaan, pembunuhan, perekrutan hasil alam dan seumpamanya, maka layaklah kalau Aceh menampakkan keberaniannya yang sampai hari ini tidak ada keberanian tersebut pada provinsi lain, yaitu melawan Indonesia sebagai penghajaran terhadap orang-orang tidak tahu membalas jasa. Minimal begitulah deskripsi kemarahan Aceh ketika kemuncaknya semangat Gerakan Aceh Merdeka yang dimulai pada 4 Desember

1976.

4. Tidak mengizinkan berlakunya syari'at Islam terhadap Aceh

Persoalan syari'at Islam merupakan harga mati bagi bangsa Islam Aceh zaman dahulu tetapi pihak Indonesia mengkhianati janji yang telah diberikan kepada Aceh oleh seorang presiden yang bergelar Insinyur. Itu merupakan kefatalan yang paling anjlok terjadi terhadap Aceh, ketika Indonesia kewalahan membendung gerakan perlawanan baru ianya diberikan manakala marah Aceh sudah tidak terbendung lagi dan dengan marah tersebut pihak pejuang Aceh menolak menerima pemberiannya yang sudah tidak diminta lagi. itu namanya nasi sudah menjadi bubur tidak akan dapat kembali menjadi nasi. Ibarat tutur kata terlanjur dikeluarkan, tidak akan mungkin dicabut kembali, air liur yang sudah diludah tidak akan mungkin ditelan kembali.

Syari'at Islam buat orang Aceh merupakan warisan dari nenek moyang mereka dan nenek moyang mereka menerima warisan tersebut dari Rasulullah SAW yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh dipisahkan dengan atribut negara. Karena itu pelaksanaan syari'at Islam di Aceh bukan persoalan Aceh dominan muslim, dan bukan karena Aceh memiliki nilai sejarah Islam yang tinggi, melainkan itu merupakan persoalan warisan. Yang namanya warisan mau tidak mau harus diteruskan, senang tidak senang harus disenangi, ibarat makanan yang halal lagi baik yang diperlukan tubuh seseorang, enak tidak enak harus dimakan. Itulah warisan. Ketika Indonesia melarang orang Aceh memakan hidangan warisan yang diperlukan tubuh badan maka itu namanya melanggar HAM.

5. Menyambung perjuangan yang putus dari Tgk. Chik Di Tiro ke Tengku Hasan Tiro

Satu kesan unik terjadi dalam perjuangan GAM adalah pendiri utamanya bertekad mendeklarasikan awal perjuangan pada tanggal 4 Desember karena dikaitkan dengan kesyahidan orang tuanya pada tanggal tersebut dibunuh penjajah Belanda. Menurut pendiri GAM keturunan Teungku Chik Di Tiro merupakan pewaris kerajaan Aceh. Ketika beberapa keturunannya syahid maka pendiri GAM sebagai salah seorang keturunan Tiro berusaha melanjutkan perjuangan yang sempat tertunda tersebut.

Jadi perjuangan GAM merupakan perjuangan kelanjutan daripada perjuangan kerajaan Aceh yang dari raja terakhir Muhammad Daudsyah diambil alih perjuangannya oleh Tgk. Chik Di Tiro Muhammad Saman sehingga beberapa orang keturunannya syahid sampai lahirnya negara Indonesia yang menarik Aceh menjadi bahagian daripadanya. Pendiri GAM coba memisahkan masalahnya kembali bahwa Indonesia tidak berhak menganeksasi Aceh seperti sekarang ini karena Aceh merupakan satu kerajaan berdaulat di muka bumi. Manakala penjajah Belanda sudah lari dari Aceh maka Aceh harus berdaulat kembali dan menjadi sebuah negara seperti sediakala, dan Indonesia tidak berhak menganeksasi Aceh. Demikian pemahaman Tengku Hasan Tiro berkenaan dengan kedudukan Aceh dalam peta dunia.⁵⁴

Perjuangan GAM dirangkainya sebagai penebus Aceh dari estafeta penjajah dari Belanda kepada Jawa.

54 Wawancara dengan Tgk. Fauzi Zainal Abidin Tiro, salah seorang keponakan Hasan Tiro, Banda Aceh, 15 Agustus 2018.

Makanya para pejuang GAM dalam masa perlawanannya terhadap Indonesia mengklaim bahwa Indonesia Jawa sedang menjajah Aceh dan Aceh wajib melepaskan diri darinya. Sebagai terusan sikap pejuang GAM tersebut, mereka sering menyebut kepada musuhnya sebagai *sipa-i* yang bermakna orang jahat dan aggressor.

6. Mengklarifikasi sejarah perjuangan *endatu* dari perlawanan terhadap Belanda ke perlawanan terhadap Indonesia.

Dalam perjuangan kemerdekaan Aceh oleh Gerakan Aceh Merdeka, para pejuangnya mengklaim bahwa Indonesia melanjutkan penjajahannya terhadap Aceh dari pendahulunya penjajah Belanda. Oleh karenanya dalam persepsi mereka melawan Indonesia Jawa merupakan lanjutan daripada perlawanan terhadap penjajah Belanda. Menurut mereka ketika Belanda sudah tiada di Aceh maka Aceh harus kembali kepada orang Aceh bukan kepada Indonesia Jawa. Ketika itu tidak terjadi maka orang Aceh harus berjuang untuk memisahkan Aceh dari Indonesia Jawa, dan itu merupakan perjuangan suci untuk mengambil haknya sendiri yang sudah dirampas orang.

Pemikiran tersebut ada nilai objektifnya manakala dikaitkan dengan sejarah yang pernah ada untuk Aceh. Tetapi untuk kondisi hari ini di mana dunia dikuasai penuh oleh kuasa-kuasa besar dunia yang non muslim, mereka tidak akan membiarkan setapakpun bumi yang berpotensi bangkitnya Islam jadi sebuah negara. Itulah sebabnya Aceh tidak merdeka di tangan GAM yang memiliki kesempurnaan perjuangan dengan kelengkapan persenjataan dan SDM yang lumayan, tetapi Timor Timur

yang dihuni ummat Kristiani bisa merdeka dengan kapasitas perjuangan, persenjatan, dan SDM yang sangat minim dan terkesan seadanya.

Tidak ada negara yang mendukung dan membantu Aceh untuk memerdekakan diri dari Indonesia, tetapi ada negara-negara yang membantu Timor Timur (Timor Leste) untuk memisahkan diri dari Indonesia seperti Portugal, Australia, Belanda, dan lain-lain sehingga Timor Timur menjadi negara berdaulat yang bernama Timor Leste hari ini. Yang menjadi persoalan baru bagi Aceh adalah perjuangannya belum maksimal sudah berunding yang hasil perundingannya sangat merugikan Aceh sendiri. Wallahu a'lam.



BAB LIMA

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PERJUANGAN DI/TII DENGAN GAM

A. PERJUANGAN DI/TII YANG BERBASIS SYARI'AH DARI AWAL SAMPAI AKHIR

1. Perjuangan sebagai jihad fi sabilillah

Gerakan DI/TII bergerak di Aceh dilandasi oleh semangat jihad fi sabilillah para mujahidin Aceh yang pada waktu itu negara Indonesia belum lama merdeka. Hitungan invasi Belanda kedua hujung tahun 1948 dengan munculnya gerakan DI/TII tahun 1949 di Pulau Jawa dan tahun 1953 di Aceh hanya berkisar satu dan lima tahun saja. Semangat jihad melawan kafir masih terpatri dalam sanubari muslim dan muslimah di tanah air waktu itu, ditambah lagi dengan kepemimpinan Soekarno yang anti Islam dan pro Komunis membuat para mujahidin dan

mujahidah angkat senjata dalam bingkai DI/TII untuk mewujudkan Negara Islam Indonesia.

Latar belakang historis ini kemudian dipacu oleh keyakinan ideologis ummat Islam yang pada waktu itu lebih 90 % menghuni wilayah Indonesia. Karena dalam Islam ada perintah mempertahankan Islam sampai berakhir hayat dikandung badan, ditambah dengan perbekalan sisa-sisa senjata masa perlawanan terhadap penjajah masih ada maka bangkitlah ruh jihad fi sabilillah tersebut semata-mata untuk mempertahankan Islam tercinta.

Bukti lain bahwa gerakan tersebut sebagai bahagian dari jihad fi sabilillah adalah tercermin pada gerakan para mujahidin yang sangat tha'at kepada Allah baik dalam beribadah maupun dalam bermu'amalah dan juga sangat sopan dalam berjihad sehingga anak-anak kecil, orang tua, perempuan yang tidak terlibat dalam perang tidak diganggu walaupun berhadapan dengan mereka di jalan-jalan.⁵⁵ Yang menjadi target dalam jihad fi sabilillah tersebut adalah tegaknya negara Islam, majunya Islam dan berjalannya syari'at Islam di bumi Aceh.

2. Berjuang melawan kedhaliman

Perlawanan gerakan DI/TII terhadap Republik Indonesia merupakan sebuah perjuangan melawan kedhaliman yang diciptakan rezim berkuasa di ibukota Jakarta. Pada masa perjuangan fisik melawan penjajah semua ummat Islam di Indonesia berkorban jiwa raga untuk memerdekakan negara dengan kalimat Allahu Akbar, dengan harapan ketika Indonesia merdeka

55 Wawancara dengan Drs. tdk. Yusri Ahmad, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kabupaten Pidie, Sigli, 21 April 2018.

ummat Islam dapat menjalankan syari'at Islam dengan sempurna di dalamnya. Namun yang terjadi adalah para penguasa negara pasca kemerdekaan membiarkan Islam dan syari'ahnya dan memberi peluang berkembangnya Komunis, sekularis, dan nasionalis dalam pemerintah dan dalam negara.

Akibat dari itu muncullah berbagai kedhaliman terhadap ummat Islam di Indonesia pada waktu itu, termasuklah mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebathilan lewat ideology ciptaan Soekarno bernama NASAKOM (Nasional, Agama, Komunis). Nasional diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), agama diwakili oleh partai Nahdhatul Ulama (NU), dan komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).⁵⁶ NASAKOM tersebut ditargetkan Soekarno menjadi ideology baru untuk mencampur adukkan kebenaran dengan kesalahan sehingga ia mudah memimpin negara sesukanya dan dapat dukungan negara-negara luar yang tidak suka kepada ideology Islam.

Selain itu banyak kedhaliman yang dilakukan rezim berkuasa waktu itu seperti praktik prostitusi, perjudian, diskriminasi dalam pendidikan Islam dan sebagainya. Semua itu mengundang emosional kaum muslimin untuk bangkit memberantas dengan senjata, maka lahirlah gerakan DI/TII sebagai salah satu solusi. Jadi DI/TII lahir di Aceh turut dilatarbelakangi oleh kedhaliman penguasa terhadap Islam dan ummat Islam yang membuat ummat Islam kehilangan kesabaran, lalu angkat senjata untuk

56 Wawancara dengan Said Marwan, mantan wakil ketua MPU dan tokoh masyarakat Aceh Barat Daya (ABDYA), Blang Pidie, 3 januari 2018.

berperang.

3. Ingin mewujudkan Aceh sebagai bahagian dari DI/TII

Awal sekali muncul pemikiran gerakan DI/TII di Aceh berkat negosiasi Mustafa sebagai utusan Karto Suwiryo kepada Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh, Mustafa berbulan-bulan malah bertahun-tahun meyakinkan ulama dan pemimpin Aceh tersebut agar bergabung dengan gerakan DI/TII yang dicetuskan Karto Suwiryo. Setelah lama mempelajari dan menganalisa serta bermusyawarah dengan koleganya akhirnya Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh menerima konsep dan gerakan tersebut, akhirnya beliau mengisytiharkan perlawanan terhadap Indonesia dari bumi Aceh dengan latar belakang yang telah kita sebutkan di belakang.

Tujuan awal bergabung dengan DI/TII adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam Indonesia, maka seluruh Indonesia perlu lahir DI/TII seperti di Aceh. Jadi ide paling awal DI/TII Aceh lahir adalah untuk bergabung dan memperkuat gerakan DI/TII secara nasional sehingga suatu masa wujud negara Islam Indonesia dengan perjuangannya gerakan DI/TII tersebut. Bagi ummat Islam di Aceh ketika mendengar ada gerakan yang ingin mewujudkan negara Islam khususnya di Indonesia maka mereka spontan saja simpatik dan mendukungnya.

4. Ingin menjalankan syari'at Islam kaffah dalam negara Aceh

Tujuan lain lahirnya gerakan DI/TII di Aceh adalah untuk dapat menjalankan syari'at Islam kaffah di Aceh

sebagaimana idaman ummat Islam Aceh dari zaman ke zaman. Dalam pemikiran para pemimpin dan rakyat Aceh terutama yang bergabung dengan gerakan DI/TII ketika perjuangan gerakan tersebut berhasil maka Indonesia menjadi negara Islam dan Aceh menjadi bahagian dari negara Islam Indonesia yang berlaku hukum Islam secara penuh di dalamnya.

Lahirnya gerakan ini di Aceh juga tidak lepas dari janji presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno yang kalau Indonesia merdeka atas bantuan para mujahidin Aceh maka bagi Aceh akan diberikan hak untuk menjalankan syari'at Islam secara penuh di sana sebagaimana yang telah kita huraikan panjang lebar di belakang. Tetapi janji Soekarno sebagai presiden Indonesia tersebut kemudian dikelabui dan tidak ditepati, sebagai kompensasi dari itu semua maka lahirlah perlawanan untuk menebus janji yang dikhianati. Ummat Islam Aceh berjihad terhadap sebuah kedhaliman seorang presiden bernama Soekarno, walaupun perjuangan ummat Islam Aceh tersebut tidak mencapai sasaran, tetapi niat dan tujuan untuk menegakkan Islam sudah dipenuhi semenjak memerangi para penjajah dari luar negara sampai kepada penipu dalam negara.

B. PERJUANGAN GAM YANG BERBASIS KE-ACEHAN

1. Perjuangan untuk mengembalikan marwah Aceh

Sebelum lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pihak Republik Indonesia (RI) bersifat sangat angkuh dan arrogan serta berpenampilan bak seseorang raja terhadap Aceh dan bangsanya. Hal ini nampak dalam kehidupan sehari-hari di mana rakyat Aceh diperlakukan seperti

rakyat kelas dua di negara yang dimerdekakannya sendiri. Dalam dimensi pendidikan rakyat Aceh sangat tidak mendapatkan peluang melanjutkan pendidikan untuk porsi luar negeri sebagaimana yang diberikan RI terhadap rakyat lain di Pulau Jawa.⁵⁷ Apalagi pada masa-masa terjadinya pemberontakan GAM dengan RI yang berlangsung sampai 30 tahun lamanya.

Banyak hal lainnya yang menjadi termarginalnya rakyat Aceh di negara RI sebelum terjadinya perang GAM dengan RI yang sangat amat menyusahkan dan menyedihkan rakyat Aceh. Diskriminasi dalam bidang pembangunan fisik dan infra struktur sudah sangat lumrah dipahami oleh rakyat Aceh sehingga sebahagian besar rakyat Aceh sudah hilang kepercayaan terhadap RI.

Awal dari itu semualah membuat sebahagian orang-orang terkemuka di Aceh mengambil inisistif untuk menebus marwah dan *dignity* yang sudah diobok-obok oleh pihak RI. Upaya pengembalian marwah dan harga diri bangsa Aceh tersebut kemudian menjalar keseluruh wilayah Aceh dengan mudah sekali karena mayoritas rakyat Aceh sudah merasakan kondisi diskriminasi Aceh oleh RI tersebut. Pengangkatan dan tebusan marwah Aceh tersebut menimbulkan semangat baru rakyat Aceh manakala sejarah kehebatan dan keistimewaan Aceh sebagai sebuah negara berdaulat terbongkar kembali lewat perjuangan GAM.⁵⁸

57 Wawancara dengan Drs. Bismi Syamaun, Ketua Yayasan Ar-Rabwah Aceh, Banda Aceh, 27 September 2019.

58 Wawancara dengan Tgk. Muhammad Zainul Abrar, tokoh GAM wilayah Aceh Rayeuk, Banda Aceh, 27 September 2018.

2. Perjuangan untuk menguasai hasil alam Aceh

Perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menguasai hasil alam Aceh mencuat tinggi setinggi-tingginya manakala GAM muncul dan Berjaya menguasai Aceh secara defacto. Upaya tersebut muncul akibat dirambahnya seluruh hasil alam Aceh dibawa ke ibukota Indonesia di Jakarta, tiada sepersenyupun hasil alam Aceh yang dirampas Jakarta diberikan kepada Aceh dalam rentang waktu yang berkepanjangan semenjak Indonesia merdeka sampai tahun 2005 manakala terjadi perdamaian GAM dengan RI dan lahirnya Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang lebih terkenal dengan sebutan UUPA.

Terkesan harta sendiri dirampas pihak lain, orang-orang Aceh merasa dijadikan dirinya sebagai sapi perahan. Maka bangkit untuk menebus keserakahan orang-orang yang sedang berkuasa di ibu kota Jakarta yang meninabobo Aceh untuk menguasai dan merampas hasil alamnya. Pihak Gerakan Aceh Merdeka sangat sadar kalau perilaku Indonesia sangat dhalim terhadap Aceh dan merampas hasil alam Aceh semuanya digunakan untuk keperluan Indonesia tanpa menghargai Aceh sebagai sumber harta yang dirampasnya.

3. Perjuangan untuk menyejahterakan bangsa Aceh

Karena kehidupan masyarakat Aceh yang kaya hasil alamnya dan kaya SDMnya sangat tidak sejahtera dalam rezim Republik Indonesia terutama masa kepemimpinan Soeharto pada masa Orde Baru (Orba), maka GAM bangkit berjuang untuk menyejahterakan rakyat Aceh dari kerakusan dan kedhaliman rezim Orba

tersebut.⁵⁹Perjuangan GAM tersebut kemudian Nampak hasilnya manakala GAM dalam perjuangannya membela rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kehidupan. Perjuangan tersebut membuat RI memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi rakyat Aceh melalui bantuan-bantuan langsung berupa hibah dan pinjaman.

Berjuang untuk menyejahterakan kehidupan bangsa Aceh oleh GAM menjadi sasaran inti dan paling utama mengingat kehidupan rakyat Aceh sudah sangat ambruk dan tidak menentu pada masa tersebut. Hasil perjuangan GAM tersebut terealisasikan dalam bentuk infra struktur seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung pemerintah di Aceh dan lainnya seperti berlaku syari'at Islam, mendapatkan bagi hasil alam. Semua itu terealisasikan hanya karena Aceh berjuang lewat perjuangan Gerakan Aceh Merdeka, tanpa perjuangan GAM kesejahteraan tersebut jangan diimpikan ada di Aceh. Buktinya, wilayah lain selain Aceh tidak mendapatkan apa yang sudah didapati Aceh hari ini karena wilayah lain tidak melawan dan tidak memerangi Indonesia.

4. Perjuangan untuk memerdekakan Aceh

Perjuangan paling inti yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah untuk memerdekakan Aceh dari wilayah Indonesia. Perjuangan ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh sejumlah rentetan sejarah yang dilakukan Indonesia terhadap Aceh seperti diskriminasi dan eksploitasi yang dilakukan Indonesia bertahun-tahun di Aceh. Ketika Aceh dominan berkesimpulan tentang kejahatan Indonesia terhadap Aceh maka rakyat Aceh

⁵⁹ Wawancara dengan Tgk. Muhammad Zainul Abrar, tokoh GAM wilayah Aceh Rayeuk, Banda Aceh, 27 September 2018.

bangkit kemarahannya untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Upaya pemisahan Aceh dari wilayah Indonesia tersebut memuncak ketika terjadi reformasi dan tumbangny rezim Orba pimpinan Soeharto di Indonesia pada tahun 1998. Mulai tahun inilah GAM bersemangat dan bangkit cepat sehingga wilayah barat selatan yang sebelumnya tidak ada para pejuang GAM segera muncul yang dibawakan oleh para pejuang GAM dari wilayah timur Aceh, wilayah utara Aceh, dan Pidie.⁶⁰

C. SINGKRONISASI PERJUANGAN ANTARA ISLAM, DI/TII, DAN GAM

1. Konsep ideologi perjuangan

Dalam Islam konsep ideologi yang digunakan dalam perjuangan adalah *Diynul Islam* yakni meletakkan *din* Islam sebagai ideologi dalam sesuatu perjuangan. Mengingat Islam bukan hanya sekedar agama samawi melainkan ia juga merupakan *way of life* bagi setiap kaum, ummah, dan bangsa, khususnya ummat Islam. Karenanya setiap perjuangan yang dimotori, yang diprakarsai, dan yang dilaksanakan ummat Islam mesti sesuai dengan ketentuan Islam dan tidak boleh dirobah, idak boleh dimodifikasi, dan tidak boleh ditukar ganti. Karena Islam merupakan jalan hidup yang sempurna yang mengatur segala keperluan hidup ummat manusia kapan dan di mana saja termasuk tatacara berjuang, berperang, mendirikan negara dan seterusnya.

Mereka yang memahami konsep Islam tersebut

60 Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, 27 September 2018.

tidak akan mau menegakkan sesuatu perjuangan dalam arti perlawanan terhadap pihak-pihak berkuasa pikiran dan pemikiran mereka yang berlawanan dengan konsep Islam itu sendiri. Maka kita dapat melihat bagaimana perjuangan Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hasan al-Banna, Jama'ate Islami yang didirikan Abul Akla al Maududy, Masyumi yang didirikan Muhammad Natsir, dan lainnya yang berkiprah semata-mata dengan Islam, oleh Islam, dan untuk Islam. Semua itu selaras dengan perjuangan Rasulullah SAW yang membangun Madinah menjadi negara Islam dan menjadi modal perjuangan Islam keseluruhan dunia.

Di Aceh ada gerakan DI/TII yang pada prinsipnya meletakkan ideologi Islam sebagai dasar dalam kehidupan dan perjuangan mereka. Pemimpin gerakan ini tidak mau meletakkan dasar perjuangan yang bukan Islam karena takut dunia dan takut akhirat. Takut dunia bersalahan dengan ketentuan agama Islam dan takut akhirat karena terancam masuk neraka. Menurutny, meletakkan Islam sebagai ideologi perjuangan suatu kewajiban dalam Islam, kalau ada yang mati dengannya bermakna mati syahid, tetapi kalau meletakkan ideologi selain Islam sebagai dasar perjuangan maka kalau mati bukan mati syahid dan tidak mampu mempertanggungjawabkan dengan Allah di hari nanti.⁶¹

Sementara perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dimotori oleh Hasan Tiro tidak pernah jelas meletakkan ideologi perjuangannya dengan ideologi Islam karena menurutnya apabila Islam dijadikan dasar

61 Hasil wawancara dengan M. Nur El Ibrahimy, mantan anggota DPR RI fraksi Masyumi, Jakarta 3 Maret 1997.

perjuangan maka tidak akan mendapatkan bantuan internasional dari negara-negara lain termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh karenanya untuk konsumsi dunia pendiri dan para pengikut GAM mengedepankan perjuangannya sebagai perjuangan yang bersifat nasional untuk membebaskan Aceh dari adoptasi dan aneksasi Republik Indonesia. Namun untuk konsumsi internal komunitas Aceh Merdeka bersilat lidah dengan perjuangan Islam yang mendasarkan pada ideologi Islam.⁶² Di sini terdapat sedikit perbedaan antara dasar ideologi yang dipasang DI/TII dalam perjuangan melawan rezim Orla pimpinan Soekarno dengan ideologi yang digunakan GAM dalam perjuangan melawan rezim Orba pimpinan Soeharto.

2. Konsep negara

Dalam Islam, tidak ditentukan secara khusus konsep negara baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits. Namun mengikut praktik Rasulullah SAW ketika memimpin Madinah dahulu negara dikuasai dengan ketentuan Islam yang diikat dengan shahifah Madiynah yang populer dengan sebutan konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Dengan demikian semua warga negara harus tunduk patuh kepada ketentuan yang dibentuk Nabi tersebut sehingga negara berada dalam kondisi majemuk sesuai dengan penduduk yang beragama namun kendalanya berada di tangan Rasul Allah SAW.⁶³

62 Wawancara dengan Tgk. Yusri Ahmad, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Pidie, Sigli, 23 April 2018.

63 Sebagai bahan bandingan silakan baca H. Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah, Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta: 2014, hlm., 25-30.

Konsep negara yang diformatkan gerakan DI/TII adalah sebagai wasilah dari format yang dipraktikkah Rasulullah SAW dan menelusuri konsep yang pernah diletakkan oleh Sultan Iskandar Muda dalam Negara Kerajaan Aceh Darussalam (KAD) dahulukala. Jadi negara sebagai alat untuk menjalankan hukum-hukum Allah di dalamnya walaupun dalam negara terdapat non muslim sebagai penduduknya. Memimpin negara adalah untuk menegakkan Hukum Allah, menyejahterakan warganya, menekan upaya-upaya pemurtadan dengan berinisiatif untuk memperbanyak para muallaf.

Sementara konsep negara dalam pandangan GAM adalah mengikut ketentuan pendahulu sebagai warisan kepada para keturunannya. Jadi tidak ada konsep konkrit yang dapat dipegang sebagaimana yang pernah diamalkan Rasulullah SAW dan yang dilanjutkan oleh DI/TII. Ada kesan pihak GAM tidak menetapkan secara gamblang rumusan konsep negara sebagaimana yang di lakukan Nabi karena ada kemungkinan berubah dan berbeda dalam perjalanan perjuangan mereka sehingga berdirinya Negara Aceh yang merdeka. Karena para pejuang dalam kalangan mereka penuh semangat emosional ke-Aceh-an maka mereka sangat bersungguh-sungguh dalam berperang melawan Indonesia atas dasar-dasar yang sudah kami sebutkan di belakang.

3. Bentuk negara

Dalam Islam secara khusus tidak disebutkan bagaimana bentuk negara yang harus dijalankan oleh ummat Islam seperti model negara-negara yang berkembang hari ini. Tetapi ketika melihat perjuangan

Rasulullah SAW membangun masyarakat dalam wilayah-wilayah yang dimulai dari wilayah Yatsrib (Madinah), Makkah dan terus berkembang ke wilayah-wilayah lainnya, ada kesan bahwa negara yang wujud pada waktu itu adalah negara mengikut wilayah taklukan. Semakin besar wilayah yang ditaklukkan Nabi maka semakin besar pula wilayah sebuah negara Islam. Ketika Nabi wafat pucuk pimpinan ummat Islam yang sekaligus pemimpin negara Islam beralih kepada Abu Bakar ash-shiddiq dan seterusnya kepada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abitalib. Pada masa khalifah Rasyidin tersebut wilayah yang dipimpin mereka semakin luas, para pakar politik Islam memberikan nama wilayah negara yang dipimpin tersebut dengan khilafah menyematkan kepada nama para pemimpin yang bergelar khalifah. Dengan demikian sebahagian para ilmuwan memberinama untuk negara Islam itu berbentuk khilafah.

Pada zaman Nabi dan zaman Khulafaurrasyidin dalam pantauan siyasah Islamiyah belum ada negara yang berbentuk monarkhi, berbentuk demokrasi, berbentuk kesatuan, berbentuk serikat, berbentuk federasi sebagaimana yang wujud pada zaman kini. Oleh karena itu negara Islam yang ada pada zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin tersebut kemudian diberinama oleh para ilmuwan sebagai negarayang berbentuk khilafah, sementara pemimpin pasca Nabi disebut khalifah, gelar khalifah tersebut berkepanjangan sampai kepada zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, zaman Fathimiyah, sehingga ke zaman Bani Usmaniyah yang berakhir pada abad kesembilan belas.

Bentuk negara yang dicadangkan oleh para pejuang Negara Islam Indonesia (NII) dalam perjuangan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) adalah Negara Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjurus kepada bentuk negara federasi.⁶⁴ Melihat pemberian kekuasaan dan wewenang kepada wilayah-wilayah yang melawan RI dalam kasus DI/TII seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan lainnya nampak bentuk negara Islam yang diperuntukkan kaum pejuang pendirian Negara Islam tersebut berbentuk federasi. Hal ini juga terindikasi manakala Aceh kemudian mengisytiharkan Negara Bagian Aceh Negara Islam Indonesia (NBA/NII) yang kemudian berubah nama lagi menjadi Negara Republik Islam Aceh (NRIA).

Dalam perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), para pejuangnya hampir tidak pernah memunculkan bagaimana bentuk negara yang akan didirikan mereka kalau Aceh lepas dari Republik Indonesia. Jadi bentuk negara menurut mereka tidak pernah jelas, yang sangat jelas bagi mereka adalah, yang paling penting Aceh harus merdeka dahulu baru nanti menyangkut dengan bentuk negara ditentukan kemudian.⁶⁵ Dalam perjalanan perjuangan GAM pada masa konflik berlangsung, para pejuangnya selalu menginformasikan bahwa prihal yang sangat amat penting bagi mereka adalah bagaimana untuk memerdekakan Aceh dari aneksasi Indonesia, soal bentuk negara nanti akan kita runding dengan para ulama, para tokoh, para ilmuwan manakala Aceh sudah menjadi sebuah

64 Wawancara dengan Tgk. Muhammad Yus, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh 30 September 2018.

65 Wawancara dengan Tgk. Muhammad Yus, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh 30 September 2018.

negara yang sah dan berdaulat di permukaan bumi ini.

Namun demikian catatan yang ditulis Al Chaidar menegaskan bahwa negara yang diformatkan Hasan Tiro berbentuk *monarchy* (kerajaan) dengan dasar hukumnya Al-Qur'an dan Al-Hadits. Presidennya disebut *Wali Nanggroe*, Hasan Tiro mengklaim dirinya pewaris kerajaan Aceh yang ke 41, ia juga mengangkat satu-satunya putera yang dimiliki bernama Karim Tiro sebagai *The 18th Prince of Karim*.⁶⁶ Klaim sebelah pihak tersebut bukan hanya tidak dapat diterima oleh semua orang Aceh melainkan tidak banyak orang Aceh yang tau klaim Hasan Tiro tersebut sehingga tidak memberikan pengaruh yang berarti dalam masyarakat Aceh. Apalagi Karim yang diidamkan Hasan Tiro tidak pernah dikenal mayoritas orang Aceh, jangankan Karim sendiri tidak menginginkan klaim tersebut, buktinya ia tidak pernah menampakkan dirinya pada masyarakat publik di Aceh termasuk ketika ayahnya Hasan Tiro meninggal dunia.

4. Sistem pemerintahan

Makna sistem yang diberikan oleh para pakar dalam berbagai tulisan adalah sangat beragam, seperti; bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu sama lain yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi, kabupaten/kota yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggerak adalah rakyat yang menghuni negara tersebut. Istilah "sistem" sering sekali digunakan orang

66 Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Jakarta: Madani Press, 1999, hlm., 189-190.

dalam percakapan sehari-hari. Istilah ini digunakan dalam berbagai hal, dan berbagai bidang, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara benda tersebut. Sistem berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) yang bermakna suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.⁶⁷

Dalam Islam, sistem negara tidaklah disebut secara gamblang dan transparan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits. Namun demikian menyimak perilaku dan pola kepemimpinan Rasulullah SAW. sepertinya Beliau sangat mengedepankan musyawarah dalam memimpin sehingga sebahagian pakar politik Islam menamakan sistem pemerintahan Islam adalah syura. Artinya dalam pemerintahan Islam tidak berlaku doktrin absolute seperti yang berlaku dalam negara kerajaan, tidak pula berlaku kebebasan rakyat seperti yang berlaku dalam model demokrasi, dan tidak berlaku pula model komunis yang mengedepankan peran partai dalam berbagai keputusan bernegara.

Dalam sejarah perjuangan gerakan DI/TII terlihat bahwa para pejuangnya menempatkan sistem Islam dalam seluruh kepentingan politik mereka sehingga sinkron dengan tujuan pendirian sebuah negara yang diberi nama negara Islam yang di Indonesia disebut Darul Islam. Sistem pemerintahan gerakan DI/TII sudah jelas mengikut bagaimana yang diatur dalam ketentuan Islam, kalau Islam

67 <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>

dahulu dipraktikkan sistem syura dalam pemerintahan maka gerakan ini juga mengarah ke system pemerintahn bernama syura, demikian sepintas data yang diperoleh dari berbagai sumber yang tidak disebutkan secara transparan ketentuan sisten pemerintahan dalam persepsi para pejuang DI/TII.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama berjuang memisahkan diri dari negara Indonesia seperti tidak memberikan kejelasan sistem pemerintahan yang akan dibentuk ketika perjuangannya berhasil sehingga terjadinya perdamaian dengan pihak Indonesia. Ketika ada yang bertanya kepada pejuang-pejuang GAM mereka sering sekali menjawab: “yang penting kita merdekakan dulu Aceh dari Indonesia dan kita tegakkan dulu negara Aceh setegak-tegaknya baru persoalan sistem pemerintahan dan keperluan lainnya kita bermusyawarah dengan kaum ulama nanti, sekarang kita fokus dengan pembebasan Aceh dari Indonesia”.

Dari pembicaraan sebahagian pejuang GAM kita dapati informasi bahwa mereka cenderung menyerahkan kepada pemimpin mereka; Tengku Hasan Tiro berkenaan dengan konsep negara sehingga mereka tunduk patuh kepadanya. Dalam perjalanan perjuangan sebahagian mereka sering menegaskan kalau negara Aceh terbentuk maka Tengku Hasan Tiro yang menjadi Wali Neugara sebagai pemimpin tertinggi. Apabila beliau meninggal dunia akan digantikan oleh puteranya Karim yang berada di Amerika.

Kalau pembicaran seperti itu benar adanya maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pemerintahan

yang diasaskan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah sistem pemerintahan monarkhi. Kalau informasi tersebut tidak benar maka sistem pemerintahan yang dibangun GAM tidak jelas sama sekali.⁶⁸ Ada analisa bahwa pendiri yang sekaligus pemimpin GAM; Hasan Tiro sengaja mengkerabui sistem pemerintahan GAM agar tidak menimbulkan pro dan kontra dalam perjuangan sehingga terjadi perpecahan dalam perjuangan. Kalau benar begitu adanya berarti tokoh utama GAM tersebut menjaga kemuslihatan dalam perjuangan demi kestabilan perjuangan GAM itu sendiri. Namun bagi orang-orang terdidik, cara demikian kurang menarik karena tidak ada kejelasan perjuangan yang sangat memungkinkan terjadi pembelokan suatu masa nanti ketika Aceh merdeka.

Karena kalau sudah jelas sistem pemerintahan, sudah jelas bentuk negara, sudah jelas pula dasar dan bentuk ideologi negara pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Akibatnya yang setuju akan membantu sementara yang tidak setuju akan tidak mau membantu, akhirnya menjadi firqah-firqah dalam kalangan pejuang secara khusus dan dalam kalangan masyarakat Aceh secara umum. Di satu sisi ada baiknya digunakan taktik semisal itu untuk menarik massa mengambang dan *uneducated people* (kaum tak terpelajar) untuk mendukung dan berjuang sungguh-sungguh untuk memerdekakan Aceh. Namun di sisi lain *educated peoples* susah menerima ketidakjelasan tersebut karena mereka menganggap perjuangan itu berhadapan antara hidup dan mati. Maka kalau konsep perjuangan tidak jelas hasil perjuanganpun akan tidak

68 Wawancara dengan Tgk. Muhammad Yus, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh 30 September 2018.

jelas juga. Orang-orang terpelajar biasanya mau berjuang apabila mati nanti akan mendapatkan syurga dan apabila menang mendapatkan pahala. Semua itu ada dengan adanya kejelasan perjuangan itu sendiri.

Walaubagaimanapun, catatan Al Chaidar menerangkan bahwa sistem pemerintah GAM juga menggunakan sistem syura.⁶⁹Yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah; apakah sistem syura tersebut diangkat dengan sebenarnya mengikut sistem pemerintah dalam Islam atau hanya sekedar siyasat Hasan Tiro untuk menggolkan konsep perjuangannya.Persoalannya adalah, kesan syura sangat tipis nampak dalam kepemimpinannya selama terjadinya gerakan yang bernama GAM tersebut. Persoalan lain yang muncul adalah; sesuai dengan konsep sistem sesuatu negara maka negara yang berbentuk monarkhi tidak mungkin berlaku sistem pemerintahan syura karena monarkhi tersebut bertentangan jauh dengan sistem syura. Kalau sistem syura segala sesuatu dimusyawarahkan dengan pihak-pihak yang berhak untuk itu, tetapi sistem pemerintahan monarkhi sepenuhnya diatur oleh raja.Lalu bagaimana mungkin dalam sebuah negara monarkhi berlaku sistem pemerintahan syura.

Sama halnya dengan sebuah negara kerajaan disebut kerajaan yang demokratis. Antara kerajaan dengan demokrasi seperti minyak panas dengan air dingin yang bukan tidak mau bersatu melainkan akan selalu berantam dan bergaduh. Maka ketika ada negara bersistem monarkhi di dunia hari ini disebutkan sebagai negara monarkhi yang demokratis, itu merupakan pembohongan publik,

69 Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Jakarta: Madani Press, 1999, hlm., 190.

dan pembodohan terhadap ummat manusia, karena tidak mungkin negara monarkhi yang segala sesuatunya dihatur raja dapat berlaku sistem demokrasi yang segalanya ditentukan rakyat.

D. PARADOKSI PERJUANGAN ANTARA KONSEP ISLAM, DI/TII, DAN GAM

Dalam bahagian ini kita mau melihat sisi pandang berbeda dalam konteks paradoksi perjuangan antara DI/TII dengan GAM dalam bingkai dan kerangka Islam. Selama ini beredar macam-macam issue dan informasi seperti perjuangan GAM tidak sesuai dan tidak sama dengan perjuangan DI/TII. Ada issue pula bahwa GAM merupakan lanjutan dari DI/TII, dan sebagainya. Bagaimana hakikat yang sebenarnya yang terjadi dari dua perjuangan besar rakyat Aceh terhadap Indonesia yang suka mempermainkan dan menipu Aceh dari zaman ke zaman.

1. Tujuan perjuangan

Sudah sama dimaklumi bahwa tujuan perjuangan GAM dengan DI/TII tidak sama seratus persen, namun di sana sini terdapat banyak persamaan antara kedua gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Aceh tersebut. Pada awalnya GAM berjuang untuk menyambung perjuangan gerakan DI/TII yang tertunda keberhasilannya, yakni untuk membebaskan Aceh dari aneksasi negara Republik Indonesia (RI) dengan mendirikan negara Islam Aceh yang berlaku hukum Islam secara penuh di dalamnya.⁷⁰

70 Wawancara dengan Abdullah Amin, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Bireuen 7 September 2018.

Namun dalam perjalanan perjuangannya GAM merasa sulit mewujudkan negara Islam di kawasan Selat Malaka karena mendapat hambatan dan tantangan dari kuasa besar dunia baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa yang tidak menyenangi adanya negara Islam di kawasan tersebut karena bakal mengganggu kepentingan mereka di sana. Sementara di sisi lain pihak GAM sangat memerlukan bantuan dari mereka baik dalam bentuk bantuan senjata, bantuan diplomasi, bantuan ekonomi dan sebagainya.

Karena alasan itulah maka pendiri GAM dalam perjalanan perjuangannya kemudian mengarahkan perjuangan tersebut kepada sebuah perjuangan nasionalis ke-Aceh-an semata-mata. Sebagai strategi yang digunakan Hasan Tiro dalam pergerakan tersebut adalah; untuk konsumsi internasional dia mengedepankan issue nasionalisme Aceh dalam perjuangannya dan untuk konsumsi Aceh digunakan issue Islam dan negara Islam. Langkah dan strategi tersebut menimbulkan pro kontra dari kalangan masyarakat terdidik di Aceh, sementara masyarakat awam tidak begitu peduli dengan strategi yang dipasang Hasan Tiro tersebut.⁷¹

Jadi jelas sekali kepada kita bahwa ide dan tujuan asal pemberontakan GAM adalah untuk mewujudkan negara Islam Aceh yang berlaku hukum Islam penuh di dalamnya. Namun ketika perjuangan itu terkendala oleh kuasa besar dunia pemimpin gerakan tersebut mencari solusi dengan menggunakan strategi ganda; di satu sisi tetap diangkat issue Islam dan negara Islam dan di sisi

71 Untuk kelengkapan data perkara tersebut Silakan baca; Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Jakarta: Madani Press, 1999, hlm., 197-198.

lain dikedepankan perjuangan nasional yang berkarakter sekuler. Strategi tersebut dalam mana-mana perjuangan selalu mengerucut kepada satu di antara dua, untuk kasus Aceh ternyata perjuangan GAM kemudiannya lebih mengerucut kepada gerakan perjuangan nasionalisme ke-Aceh-an dengan alasan utama; tugas mereka membebaskan Aceh dari Indonesia, ketika Aceh sudah bebas dan mandiri, urusan kenegaraan akan diserahkan kepada para ulama. Sebahagian masyarakat sangat senang menerima siyaset tersebut karena selaras dengan tujuan asal berdirinya GAM. Namun sebahagian yang lainnya menganggap itu sebagai tipu muslihat pendiri GAM saja untuk melegalkan dan memudahkan ia menarik massa.

Sementara tujuan perjuangan DI/TII di Aceh adalah untuk menjadikan RI sebagai Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (NII) yang Aceh sendiri menjadi bahagian daripadanya. Buktinya adalah kandungan teks proklamasi yang ditanda tangani oleh Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh yang berbunyi sebagai berikut: *Berdasarkan pernyataan Negara Republik Islam Indonesia pada tanggal 21 Syawal 1368/7 Agustus 1949 oleh Imam Kartosuwiryo atas nama ummat Islam Indonesia, maka dengan ini kami nyatakan Daerah Aceh dan sekitarnya menjadi bahagian daripada Negara Islam Indonesia.*

Atas nama Ummat Islam Daerah Aceh dan sekitarnya
Ttd.

Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh

Tertanggal

Aceh Darussalam, 13 Muharram 1373/21 September

1953.⁷²

Dengan kenyataan dari teks proklamasi DI/TII Aceh tersebut, nyata senyata-nyatanya bahwa gerakan DI/TII Aceh bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang Aceh sendiri berada di dalamnya. Ada analisa menarik yang dapat kita ambil dalam teks tersebut adalah; Aceh dan para pemimpinnya dahulu sangat mengutamakan Islam ketimbang Aceh, maka apabila berhadapan antara Aceh dengan Islam, mereka tetap meninggalkan Aceh dan memilih Islam, kasus DI/TII menjadi kenyataan yang tidak tak dapat dibantahkan.

Selain itu ketika perang melawan penjajah Belanda dan Jepang, Aceh punya kesempatan besar sebesar-besarnya untuk mandiri menjadi satu negara Aceh, namun Aceh tidak memilih itu karena harapan Islam yang lebih besar ada di Indonesia maka Aceh berjuang mati-matian untuk Islam Indonesia, namun apa hendak dikata, ketika Aceh kemudian dikhianati oleh para penguasa Indonesia dengan menjadikannya bahagian terkecil dalam RI tanpa adanya Islam yang diinginkan Aceh dan bangsanya. Kata kunci dari nilai hasil perjalanan sejarah adalah: Bangsa Aceh apabila berhadapan antara Islam dengan Aceh tetap memilih Islam dan meninggalkan Aceh, tetapi orang lain selalu memilih kaum, daerah, dan sukunya dengan meninggalkan Islam, manakala berhadapan antara keduanya. Wallahu a'lam.

Dalam Islam, tujuan sesuatu perjuangan itu hanya semata-mata untuk menegakkan dan memperkuat Islam

72 Lihat; Hardi, SH, Daerah Istimewa Aceh, Latar belakang Politik dan Masa Depan, Jakarta: Cita Panca Serangkai, cet. I, 1993, hlm., 132.

serta menjalankan syari'at Islam. Konsep inilah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam perjuangannya semenjak di Makkah sampai ke Madinah sehingga perjuangan beliau mendapatkan bantuan Allah dan Berjaya raya. Dalam kehidupan muslim, semuanya bertujuan untuk mencari ridha Allah dan mendapatkan syurga Allah, ridha dan syurga Allah itu baru didapati manakala muslim itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tujuan dari sesuatu perjuangan itu terkait erat dengan ketentuan Allah SWT.

2. Dasar perjuangan

Berdasarkan tujuan perjuangan kedua gerakan perlawanan di Aceh tersebut maka secara otomatis dasar perjuanganpun sangat mudah dilacak. GAM meletakkan dasar perjuangannya Islam untuk konsumsi internal dan nasionalisme untuk konsumsi eksternal. Sementara DI/TII yang tercermin dari teks proklamasinya tetap satu dasar perjuangannya adalah Islam. Dengan demikian dasar perjuangan DI/TII jelas, gamblang, blak-blakan dan transparan, sementara dasar perjuangan GAM ambivalen, amphibi, mendua, tidak blak-blakan dan kurang transparan.

Sebagai pengetahuan kepada semua kita, Islam merupakan satu agama yang sangat gamblang dan transparan dalam mengedepankan hukum dan ketentuan sehingga posisi kehidupan selalu berhadapan antara *haq* dengan *bathil* (benar dengan salah), halal dengan haram, lelaki dengan perempuan, siang dengan malam, kiri dengan kanan, dan syurga dengan neraka. Semua itu selaras dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.

Untuk itu semua, Islam melarang manusia lelaki menyerupai wanita dan manusia wanita menyerupai lelaki, melarang muslim memakai pakaian muslimah dan melarang muslimah memakai pakaian muslim. Islam juga sangat melarang sikap mendua dalam kehidupan ber'aqidah karena ianya menjurus kepada munafik dan syirik. Prilaku syirik dan munafik itu pertamakali diaplikasikan Abdullah bin Ubay bin Salul pada masa periode awal kehidupan Nabi di Madinah. Ia berpura-pura menjadi muslim di hadapan Nabi tetapi merusakkan Islam di belakang Nabi, akhirnya ia sendiri menjadi manusia celaka.

3. Cara berjuang

Cara GAM berjuang untuk memerdekakan Aceh dari Republik Indonesia adalah dengan pola gerilya yang dibagi kepada gerilya gampong dan gerilya kota. Gerilya gampong dipraktikkan dengan memprovokasi sebanyak-banyaknya masyarakat gampong bergabung kedalam GAM dengan target agar cepat mendapatkan pengakuan internasional dan mudah memerdekakan Aceh.⁷³ Berhubung mayoritas masyarakat gampong orang-orang terbatas pemahaman politiknya maka bagi mereka informasi seumpama itu menjadi sesuatu yang baru dan menarik diikuti.

Sementara gerilya kota dilakukan kepada orang-orang yang berpendidikan politik dengan mengajak mereka

73 Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. hlm., 191.

secara provokatif agar bersatu bersama GAM karena perjuangan GAM sah di mata hukum.⁷⁴ Malah mereka mengatakan perjuangan GAM merupakan perjuangan memperjuangkan hak milik yang sudah salah diserahkan oleh penjajah Belanda kepada Indonesia ketika Belanda pergi dari Aceh. Menurut mereka Belanda tidak berhak memberikan Aceh kepada Indonesia melainkan kepada orang Aceh sendiri sebagai pemilik sah wilayah Aceh.

Berdasarkan konsep tersebut maka GAM berjuang dengan mengedepankan cara yang agak mengandung nilai provokatif dengan tujuan cepat mencapai tujuan. Namun terkadang cara tersebut cenderung kepada anarkis sehingga ada pihak yang disakiti, dirugikan dan malah dikorbankan. Kasus pemukulan khathib jum'at tanggal 9 September 2011 di Mesjid Raya Keumala Kampung Jijiem, Kecamatan Keumala, Pidie.⁷⁵ Khathib sebagai korban pemukulan berucap: Saya dikeroyok delapan orang di atas mimbar. Saat itu saya di atas mimbar tidak bisa memberikan perlawanan. Dan, saya meminta polisi mengusut tuntas kasus pemukulan menimpa saya," kata Tgk Saiful Bahri bin Ahmad.⁷⁶

Selain itu kasus yang serupa dalam substansinya tetapi berbeda aksinya juga terjadi pada acara dakwah maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Gampong Pangoe Bambong, Kecamatan Delima, Pidie, Kamis 13 Mei 2011 malam, dengan penceramah tunggal Tgk Ghazali Abbas Adan. Dalam kasus ini sejumlah orang yang berlatar

74 *Ibid.* hlm., 191-192.

75 Serambi Indonesia, Jumat, 9 September 2011. Lihat juga; <http://www.acehkita.com/berita/khatib-salat-jumat-dipukuli-di-atas-mimbar/>

76 Serambi Indonesia, Sabtu, 10 September 2011.

belakang GAM memadamkan listrik dan menurunkan sekaligus memukul penceramah sehingga dakwah terhenti seketika.⁷⁷ Ini merupakan rentetan dari pada cara dan gaya yang dipasang untuk menaklukkan mereka yang berseberangan pikiran dengannya.

Kasus semacam itu juga terjadi terhadap Usman AR selaku khathib Jum'at di masjid Baitul Akla lil Mujahidin yang didirikan pemimpin dan ulama kharismatik Aceh; Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh Jum'at 21 September 2012.⁷⁸ Semua itu terjadi karena efek dari cara berjuang para pemberontak masa perjuangan melawan RI sehingga berembes sampai kedalam kehidupan masyarakat, karena dalam persepsi mereka siapa saja yang mengganggu perjuangan mereka dianggap lawan.

Sementara dalam perjuangan DI/TII yang dipimpin para ulama, kasus-kasus seperti itu tidak muncul karena format dan caraberjuang DI/TII lebih mengutamakan kemuslihatan dan tidak memperbanyak musuh serta lawan dalam berjuang. Oleh karenanya terkesanlah dalam kehidupan masyarakat beda antara cara orang-orang DI/TII dengan cara orang-orang GAM adalah; orang-orang DI/TII selepas damai dengan RI turun gunung mengajar dan membuka pengajian kepada masyarakat, sementara orang-orang GAM setelah damai dengan RI dan turun gunung memukul khathib dan penceramah. Wallahu a'lam.

Dalam Islam sebenarnya apa saja yang dilakukan harus menjadi bahagian dari ibadah termasuklah cara berjuang dalam sesuatu perjuangan. Islam telah mengatur semua cara dalam hidup dan kehidupan ini dalam syari'ah

77 Serambi Indonesia, Jum'at, 13 Mei 2011.

78 Serambi Indonesia, Sabtu, 22 September 2012.

atau hukum Islam yang sangat kompleks, setiap muslim wajib menjalankan ketentuan syari'ah tersebut dalam kehidupan mereka. Apabila gagal melaksanakannya maka berisiko dengan dosa dan mendapat balasan dari Allah di hari nanti. Dalam berjuang atau berjihad harus dijaga rambu-rambu jihad sesuai syari'ah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Jatsiyah (45) ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya.

4. Para pejuang

Para pejuang dalam Gerakan Aceh Merdeka pada awalnya terdiri dari mantan-mantan pejuang DI/TII seperti Teungku Ilyas Leube, Teungku Hasbi Geudong, Teungku Usman Lampoih Awe, Pawang Rasyid, Abu Rih, Teungku Abdullah Hanafiah, M. Thahir Husin, Tgk. M. Daud Husin (Daud Paneuk), Geuchik Umar Tiro, Tgk. Ilyas Cot Plieng, Geuchik Syamaun Gumpueng, dan lain-lain. Tengku Hasan Tiro sendiri merupakan tokoh DI/TII yang paling ditakuti oleh Indonesia karena perannya berupaya memasukkan kasus DI/TII dalam agenda sidang PBB. Selain itu sejumlah intelektual yang berprofesi sebagai dokter dan sarjana ikut serta dalam periode awal, seperti dokter Mukhtar Hasbi, dokter Zubir Mahmud, dokter Husaini Hasan, dokter Zaini Abdullah, Ir. Teuku Asnawi Ali, Amir Ishak, Amir Mahmud, Malik Mahmud, dan lain-lain.⁷⁹

79 Dr. Husaini M. Hasan, *Dari Gunung Halimon ke Swedia*, Jakarta: Yayasan Kerukunan Aceh Antar Bangsa, 2016, hlm., 85.

Pada awal pergerakan dimulai GAM didukung oleh generasi tua khususnya dari kalangan DI/TII, namun kemudian para pejuang GAM periode awal tersebut satu persatu meninggal dunia baik meninggal dalam perjuangan maupun meninggal karena sakit. Akibat dari itu para pejuang GAM dilanjutkan oleh generasi muda yang sebahagian besarnya lepasan latihan militer di Libya. Merekalah yang memompa semangat para generasi muda Aceh dengan menceritakan kehebatan latihan di Libya dan kehebatan Hasan Tiro untuk ikut berjuang bersama-sama. Cukup banyak para pemuda Aceh yang tergiur dengan para pejuang yang mendapatkan pelatihan di Libya tersebut.

Namun demikian mereka yang pulang dari Libya tersebut karena terlalu sangat berani dalam berperang mereka banyak yang gugur di medan perang. Sebahagian mereka yang tersangkut di Malaysia, Swedia, dan beberapa negara Eropa lainnya masih selamat sampai hari ini. Ketika generasi Libya banyak yang gugur maka pergantian generasi terjadi lagi secara alami dalam tubuh GAM. Pada periode inilah wajah GAM periode awal tidak lagi eksis karena para pejuang terakhir itu bergabung dengan GAM bukan karena apa-apa melainkan karena semangat muda dan kebencian yang tinggi terhadap Indonesia.⁸⁰

Sementara para pejuang DI/TII dari awal gerakan, malah sebelum berontak mereka sudah menyatu dalam pemikiran tentang makna sebuah perjuangan karena mereka berasal dari organisasi yang sama yaitu Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Teungku Muhammad Dawud

80 Wawancara dengan M. Nur, SH, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen fraksi Partai Aceh (PA), Bireuen, 7 September 2018.

Beureu-éh adalah mantan pimpinan PUSA yang kemudian menjadi pimpinan DI/TII. Hampir semua pembesar DI/TII berasal dari organisasi PUSA, selebihnya dari para pemimpin Aceh dan militer yang desersi bergabung dengan DI/TII.

Generasi DI/TII umumnya menguasai ilmu agama karena sebahagian besar dari mereka merupakan orang-orang terdidik ilmu agama Islam yang termasuk dalam kategori ulama. Itulah yang membedakan antara generasi GAM dengan generasi DI/TII yang sangat berpengaruh dalam perjuangan mereka masing-masing. Para pejuang DI/TII karena mengetahui hukum maka dalam berperang sangat menjaga rambu-rambu perang yang diatur dalam Islam seperti tidak mengganggu anak-anak, wanita, orang tua, orang tidak terlibat dalam perang dan seumpamanya. Sementara para generasi GAM periode akhir tidak memperhatikan sangat persoalan tersebut.

E. EKSISTENSI SYARI'AT ISLAM DALAM PERJUANGAN DI/TII DAN GAM.

Dalam perjuangan DI/TII dengan jelas mereka mengumandangkan syari'at Islam karena perjuangan mereka untuk mendirikan negara Islam Indonesia yang diproklamkan oleh Karto Suwiryo di Jawa Barat tahun 1949. Kejelasan Islam dan syari'at Islam tersebut selaras dengan naskah proklamasi yang dikeluarkan di Aceh bersamaan dengan bangkitnya DI/TII Aceh tahun 1953. Bunyi proklamasi tersebut sebagai berikut:

Proklamasi

Berdasarkan pernyataan Negara Republik Islam

Indonesia pada tanggal 21 Syawal 1368 / 7 Agustus 1947 oleh Imam Kartosuwiryo atas nama ummat Islam Indonesia , maka dengan ini kami nyatakan Daerah Aceh dan sekitarnya menjadi bagian dari pada Negara Islam Indonesia.

Atas nama ummat Islam Daerah Aceh dan sekitarnya

Ttd.

Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh

Tertanggal

Aceh Darussalam, 13 Muharram 1773 / 21 September 1953.⁸¹

Berdasarkan deklarasi tersebut jelaslah bahwa DI/TII berjuang atas dasar Islam yang dalam perjuangannya mengedepankan syari'at Islam. Bagi para pejuang DI/TII persoalan syari'at Islam sejak sebelum berontakpun sudah mengaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga mereka menyatu dengan DI/TII karena ingin mewujudkan Negara Islam Indonesia. Dengan demikian apabila perjuangannya berhasil maka dengan mudah mereka dapat menjalankan syari'at Islam dalam negara bernama Indonesia.

Sementara eksistensi syari'at Islam dalam perjuangan GAM periode awal terlihat sangat tinggi, tetapi selaras dengan perjalanan waktu ketika generasi GAM berganti setiap tahun maka mereka kurang memperhatikan persoalan syari'at Islam karena terlalu serius dengan upaya

81 Lihat Hardi, SH, Daerah Istimewa Aceh, Latar belakang politik dan masa depannya, Jakarta: Cita Panca Serangkai, cet.I, 1993, hlm., 132.

memerdekakan Aceh dari Indonesia. Walaubagaimanapun, selama perjuangan berlangsung para anggota GAM sangat menjaga syari'at Islam. Mereka mengajak orang melaksanakan shalat lima waktu, mengajak rakyat ke masjid terutama hari Jum'at.

Namun yang disayangkan adalah ketika mereka berkuasa dalam tiga periode di Aceh (periode Irwandi-Nazar, periode Zaini-Muzakkir, dan Irwandi-Nova) tidak ada kesan syari'at Islam yang kental diperjuangkan mereka. Terkadang untuk menyusun dan mengesahkan qanun Jinayah dan qanun acara jinayah saja bisa bergeser lebih lima tahun. Periode kedua Irwandi malah dia yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Sebenarnya selepas damai GAM dengan RI Aceh dengan mudah dapat melancarkan pelaksanaan syari'at Islam karena Indonesia tidak berani melarangnya karena takut kepada GAM. Tetapi para penguasa GAM tidak ada nyali kesana sehingga sampai hari ini implementasi syari'at Islam di Aceh berjalan sangat lamban.

Sementara para pejuang DI/TII baik sebelum mendapatkan kuasa selagi mengurus PUSA sudah konsen dengan Islam dan syari'at Islam sampai mereka mendapatkan kuasa terus melaksanakan syari'at Islam di Aceh. Para pejuang DI/TII setelah damai dengan RI turun gunung mengajarkan masyarakat yang sudah terlantar hamper 10 tahun lamanya. Karena sebelum berontak mereka mengajar masyarakat maka setelah berontak kembali lagi untuk mengajar mereka.

Terdapat perbedaan eksistensi syari'at Islam pada masa perjuangan GAM dengan DI/TII boleh jadi karena

faktor kader yang berbeda. GAM merekrut kader lepas untuk bergabung dalam perjuangan melawan Indonesia, sementara DI/TII merekrut kader PUSA dan pendukung-pendukungnya, maka masing-masing kader mengikuti kelazimannya. Karena itulah tidak heran kalau ada pejuang GAM yang berpendapat; kita tidak perlu menyebut perjuangan untuk syari'at Islam karena dari *endatu* kita sudah muslim. Lebih jauh dari itu mereka juga berkata: tidak boleh menjalankan syari'at Islam di Aceh takut tidak masuk investor asing ke Aceh. Statemen semacam itu merupakan bahagian lain dari perumpamaan pemain bola yang memasukkan goal ke gawang sendiri. Bahaya dan sangat berbahaya.



BAB ENAM PENUTUP

KESIMPULAN

Eksistensi syari'at Islam pada masa GAM dengan masa DI/TII terdapat perbedaan yang mendasar, baik berkenaan dengan praktik kehidupan keseharian maupun persoalan dalam perjuangan. Dalam perjuangan DI/TII dengan gamblang dinyatakan perjuang untuk negara Islam dan siapa yang mati bermakna mati syahid. Sementara dalam perjuangan GAM tidak disebutkan dengan gamblang untuk Islam dan ummat Islam, malah dalam perjuangan GAM menggunakan strategi *double standard* yaitu untuk konsumsi internal disebutkan perjuangan untuk Islam dan syari'at Islam, tetapi untuk konsumsi eksternal mereka sebut untuk perjuangan nasionalisme Aceh.

Para pejuang DI/TII berasal dari satu organisasi yakni PUSA yang terkenal mantap Islamnya, sementara para pejuang GAM tidak ada kader dari satu ormas seperti

PUSA sehingga mereka merekrut sebanyak-banyaknya putera-puteri Aceh untuk bergabung bersamanya. Setelah bergabung masing-masing mencari solusi dan jalan keluar sendiri, sedangkan PUSA dari awal semangat kebersamaan sangat diutamakan sehingga kader-kadernya jauh lebih matang ketimbang kader-kader GAM.

Dengan demikian eksistensi syari'at Islam dalam perjuangan GAM tidak terikat dan tidak mengikat dengan garis perjuangan organisasi sehingga ianya tidak menjadi kewajiban untuk mengaplikasikannya. Sementara eksistensi syari'at Islam dalam perjuangan DI/TII sangat mengikat dan menyatu dengan garis perjuangan sehingga ia menjadi sasaran utama untuk menjalankan syari'at Islam baik dalam perjuangan maupun ketika perjuangan sudah berhasil dan negara Islam sudah tegak baik di Indonesia maupun di Aceh nantinya.

SARAN-SARAN

1. Disarankan kepada seluruh masyarakat di Aceh harus mempelajari sejarah perjuangan Aceh sebagai bahan konsumsi untuk setiap orang sehingga masyarakat Aceh tidak buta sejarah, khususnya sejarah DI/TII dan GAM.
2. Kepada pemerintah (baik Aceh maupun Indonesia) disarankan untuk menjalankan syari'at Islam dalam wilayahnya masing-masing sebagai kompensasi dari keberhasilan perjuangan yang tertunda.
3. Kepada para masyarakat umumnya dan para pejuang yang masih hidup khususnya, disarankan untuk melandasi perjuangannya dengan Islam dan untuk mengaplikasikan syari'at Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Hasymy, "Dari Khazanah Masa Lalu: Lahir dan Leburnya Propinsi Aceh I", *Waspada*, Kamis 15 Desember 1983.

Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Jakarta: Madani Press, 1999.

Berita Harian, Sabtu 31 Juli 1999.

Dr. A.J. Piekar, *Aceh dan peperangan dengan Jepang*, Terjemahan Aboe Bakar, buku I, Banda Aceh, PDIA, 1989.

Dr. M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka, Ideologi, Kepemimpinan, dan Gerakan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.

Fairus M.Nur (ed), *syariat di wilayah syariat*, Banda Aceh: Dinas syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.

George Mc Turnan Kahin dkk, *Sjafruddin Prawiranegara Penyelamat Republik*, Jakarta: Yayasan Asrama dan Pendidikan Islam bekerjasama dengan Panitia

Peringatan Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911-2011), 2011.

Hardi, SH, Daerah Istimewa Aceh, Latar belakang Politik dan Masa Depan, Jakarta: Cita Panca Serangkai, cet. I, 1993..

Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 199.

Hasanuddin Yusuf Adan, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éhdan sejarah pemberontakan di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, edisi revisi, 2017.

<http://arsip.gatra.com/artikel.php?id=28474>

<http://www.acehkita.com/berita/khatib-salat-jumat-dipukuli-di-atas-mimbar/>

<http://www.nafiu.n.com/2014/03/pemberontakan-ditii-di-indonesia.html>

<http://www.nafiu.n.com/2014/03/pemberontakan-ditii-di-indonesia.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_DI/TII_di_Aceh

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_DI/TII_di_Aceh

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>

Husaini M. Hasan,Dr., *Dari Gunung Halimon ke Swedia*, Jakarta: Yayasan Kerukunan Aceh Antar Bangsa, 2016.

IjaSuntana, Dr., M. Ag, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

M. Mas'ud Said, *Psikologi Politik Masyarakat Aceh*. dalam Aceh Merdeka Dalam Perdebatan. Jakarta: P.T. Cita Putra Bangsa, 1999.

M. Nur El Ibrahim, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh*, Jakarta: Gunung Agung, 1986.

M. Nur El Ibrahimy, "Catatan tentang Pemberontakan Kaum Republik", *Serambi Indonesia*, Sabtu 13 Agustus 1994.

M. Nur El Ibrahimy, "Tanggapan terhadap buku Drs. Cornelis Van Dijk: *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*" Bahagian I & II, *Waspada* 1 & 2 Desember 1983.

Mr. SM. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Aceh*, Jakarta: Soeroengan.

Muhammad Mukhsin Khan *Sahih Bukhari* (Arabic English), vol.1, Madinah, Dar Ahya Us-Sunnah al-Nabawiya, Kitab Iman(t.t.),.

Nazaruddin Syamsuddin, *The Republican Revolt*, 195, hlm. 193.

O. E. Engelen dkk, *Lahirnya satu bangsa dan negara*, Jakarta: UI Press, 1997.

P. Van Dijk , *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Grafiti Pers, 1983.

Puspha Iyer dan Christoper Mitchell, *The Collepse of Peace Zones in Aceh*. USA: Institute for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University, 2004.

Puspha Iyer, *Peace Zone in Aceh: A Prelude to De-Militarisation*. USA: Institute for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University, 2003.

Serambi Indonesia, 10 Agustus 1999.

Serambi Indonesia, 11 Ogos 1999.

Serambi Indonesia, 13 Juni 1999.

Serambi Indonesia, Isnin 11 Januari 1999.

Serambi Indonesia, Jum'at, 13 Mei 2011.

Serambi Indonesia, Jumat, 9 September 2011.

Serambi Indonesia, Sabtu, 10 September 2011.

Serambi Indonesia, Sabtu, 22 September 2012.

Utusan Malaysia, Rabu 28 Juli 1999,.

Utusan Malaysia, Rabu 5 Mai 1999.

Waspada, 1 Agustus 1999.

Wawancara dengan Abdullah Amin, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Bireuen 7 September 2018.

Wawancara dengan Abdurrahman Kaoi, Banda Aceh, wakil ketua MAA Aceh. 23 Maret 2018.

Wawancara dengan Dr. Safwan Idris, Banda Aceh pada 3 Agustus 1997.

Wawancara dengan Drs. Bismi Syamaun, Ketua Yayasan Ar-Rabwah Aceh, Banda Aceh, 27 September 2019.

Wawancara dengan Drs. Tgk. Yusri Ahmad, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kabupaten Pidie, Sigli, 21 April 2018.

wawancara dengan M. Nur El Ibrahimy, mantan anggota DPR RI fraksi Masyumi, Jakarta 3 Maret 1997.

Wawancara dengan M. Nur, SH, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen fraksi Partai Aceh (PA), Bireuen, 7 September 2018.

Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, 27 September 2018.

Wawancara dengan Said Marwan, mantan wakil ketua MPU dan tokoh masyarakat Aceh Barat Daya (ABDYA), Blang Pidie, 3 januari 2018.

Wawancara dengan Tgk. Muhammad Yus, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh 30 September 2018.

Wawancara dengan Tgk. Muhammad Zainul Abrar, tokoh GAM wilayah Aceh Rayeuk, Banda Aceh, 27 September 2018.

Zainal Abidin Ahmad, H., *Piagam Madinah, Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta: 2014.



BIODATA PENULIS

Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA, lahir di Meunasah Jumphoh, Kemukiman Adan, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Aceh / 19 Juli 1962. Sa'at ini menjadi dosen Fiqh Siyash pada Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Alamat tinggal sementara ini di Jln. Sawah nomor 9 Gampong Ilie Kecamatan Uleekareng, Kota Banda Aceh. Aceh-Sumatera. Phone: +6285260185571 (WA) e-mail: diadanna@yahoo.com/hya@ar-raniry.ac.id/hasanyusufna@gmail.com

Pendidikan yang ditemponya adalah: Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kembang Tanjung, tamat 1974, Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN) Kembang Tanjung, tamat 1977, Dayah Po teumeureuhôm

Pu-uek Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Aceh, tahun 1974-1979, Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 tahun Beureunuen, tamat 1979, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Beureunuen, tamat 1981, Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tamat 1985, Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Jami'ah Ar-Raniry Banda Aceh, tamat 1987, Program Pendidikan Diploma Kependidikan (PPDK) Unsyiah Banda Aceh, tidak tamat, Master of Comparative Laws (MCL), Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia (IIUM), tamat 1998, Master of Art (MA) Jabatan Siasah Syar'iyyah, Fakulti Syari'ah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur tammam tahun 2000, Program Doctor Falsafah pada Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah (UMS) Kota Kinabalu Malaysia 2004-2014.

Dalam bidang organisasi beliau aktif di sejumlah organisasi intra dan ekstra kampus seperti: Sekretaris Umum Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) MTsAIN Kembang Tanjung, tahun 1977-1978, Ketua Umum OSIS MAN Beureunuen, tahun 1980-1981, Ketua Umum Senat Mahasiswa Program Pendidikan Diploma Kependidikan (PPDK) Unsyiah, tahun 1982-1985, Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1985-1986, Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008-2012.

Ketua Umum Pengurus Rayon Pelajar Islam Indonesia (PII) Kemukiman Adan, tahun 1977-1980, Sekretaris Umum Pengurus Komisariat PII Kecamatan

Mutiara, tahun 1980-1981, Ketua Umum Pengurus Komisariat PII Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1982-1984, Sekretaris satu Pengurus Daerah PII Perguruan Tinggi, tahun 1984-1986, Ketua Umum Pengurus Wilayah PII Daerah Istimewa Aceh, tahun 1986-1988, Departemen Hubungan Antar Organisasi Pengurus Besar PII, tahun 1986-1989, Ketua Asrama Mutiara Banda Aceh, tahun 1984-1985, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar dan Masyarakat (IMPM) Mutiara cabang Banda Aceh, tahun 1986-1990, Anggota Dewan Pembina Forum Komunikasi Generasi Muda Pidie (FOKUS GAMPI), tahun 1986-1990, Ketua Yayasan Kesejahteraan Pelajar Islam Daerah Istimewa Aceh (YAKPIDA), tahun 1988, Wakil Sekretaris Umum Majelis Presidium Pemuda dan Mahasiswa Aceh (MPMA) Jakarta, tahun 1988-1992, Ketua Umum Tanoh Rincong Students Assaciation (TARSA) Malaysia, tahun 1992-1995, Presiden of Human Rights Forum for Acehnese Students and Society/Forum Mahasiswa dan Masyarakat Aceh untuk Hak Azasi Manusia (FORMAHAM) Malaysia, tahun 1998-2000, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2000-2003, Wakil Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) tahun 2001-2003, Ketua Umum 'Adnin Foundation Aceh tahun 2001- 2011, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) tahun 2007-2011, 2012-2015, & 2016-2020

Pengalaman Kerja: Mengajar Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Adi Darna Banda Aceh, tahun 1987, Mengajar pada Fakultas Teknik Unsyiah Banda Aceh, tahun 1988, Mengajar pada Fakultas Ekonomi

Unsyiah Banda Aceh, tahun 1988, Mengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1988-1991, Mengajar pada Fakultas Tarbiyah Universitas Serambi Makkah tahun 2000-2004, Mengajar pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh 2009-2011, Dosen tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 2002 - sekarang, Mengelola Adnin photo copy di Jln. T. Nyak Arif No. 159, Lamgugob-Jeulingke Banda Aceh. (2001-sampai sekarang), Community Organizer, Oxfam Aceh Besar Team, sejak January sampai Maret 2005, Public Health Officer (PHO) Oxfam Aceh Besar Team, Maret 2005, Settlement and Water Supply Senior Team Leader in Oxfam Aceh Besar Team, sejak Maret 2005 sampai February 2006, Community Liaison of Oxfam Aceh Besar team, sejak Februari, 2006 sampai Agustus 2006, Consultant of Conflict and Development, World Bank Banda Aceh sejak 7 September 2006 - 30 Juni 2007, Local Governance Specialist of Canada/Aceh Local Government Assistance Program (CALGAP), 6 Oktober - 31 Desember 2008.

Pengalaman menulis: *Tamaddun dan Sejarah, Etnografi Kekerasan di Aceh*, Jogjakarta: Prismsophie, 2003, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh, Ulama, Pemimpin dan Tokoh Pembaharuan*, Bangi Malaysia: UKM, 2005, *Sejarah Aceh Dan Tsunami*, Jogjakarta: Arruz Media, 2005, *Elemen-elemen Politik Islam*, Jogjakarta: AK. Group & Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006, *Politik dan Tamaddun Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, Banda Aceh: 2006, *'Aqidah Modal Utama Implementasi Syari'ah*, Yogyakarta: AK. Group & Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006, *UUPA Dan Kemungkinan Perubahan Pemerintahan Serta Sistem Politik Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Aceh & Ar-Raniry

Press, Yogyakarta: AK. Groub, 2007, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2007, *Syari'at Islam Di Aceh antara Implementasi dan Diskriminasi*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2008, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh & Pena, 2009, *Khuthbah Jum'at dan dua Hari Raya, Kajian ilmiah tentang isue-isue semasa*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2009, *Aceh dan Inisiatif NKRI*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation publisher, 2011, *Eksistensi Kader PII Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2012, *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013, *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2016, *Andil Pusa untuk Bangsa dan Negara*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2017. *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2018. *Mosi Integral Mohammad Natsir; Upaya perpaduan ummah dan bangsa dalam NKRI*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2019. *Islam antara 'Aqidah, Syari'ah dan Akhlak*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2020. *Allah Menguji dan Menyayangiku (Kilas Balik Mushibah 1 Syawal 1443 H/13 Mei 2021 M)*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher.

Selain itu beliau aktif menulis di sejumlah jurnal, majalah, koran, tabloid, web site, dan juga buku-buku penulisan bersama. Beliau juga sering tasmpil sebagai pemateri/pemakalah dalam berbagai even seminar/lokakarya baik di dalam maupun luar negeri. Sejumlah penelitian juga telah diselesaikan dalam ranah akademik, beliau juga berpengalaman mengelola media baik sebagai

editor maupun kolumnis. Ceramah, Dialog Interaktif dan Talk Show di Media Elektronik seperti radio dan televisi. Sebagai aktivis beliau banyak melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang dakwah, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembinaan ummah.